

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparmudora) Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman perencanaan strategis lima tahunan, yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas Disparmudora.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Kami menyadari bahwa pembangunan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat jati diri dan karakter generasi muda, serta meningkatkan prestasi olahraga secara menyeluruh. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini disusun tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan akuntabel. Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran Disparmudora dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terarah dan terukur.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan, data, maupun pemikiran konstruktif. Dan semoga dokumen ini, dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing, khususnya di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga.

Malili, September 2025

KEPALA DINAS,



ANDI TARACINA AKHMAD, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19770422 199511 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1. Maksud	
1.3.2. Tujuan	
1.4 Sistematikan Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELANANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Disparmudora	8
2.1.1.2 Tugas dan Fungsi	
2.1.1.3 Struktur Disparmudora	
2.1.2 Sumber Daya Disparmudora	13
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	
2.1.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Disparmudora	37
2.1.4 Kelompok Sasaran layanan	49
2.1.5 Mitra Disparmudora dalam Pemberian Pelayanan	50
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	55
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Disparmudora	55
2.2.2 Isu Strategis	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Disparmudora Tahun 2025-2029	60
3.2 Sasaran Renstra Disparmudora Tahun 2025-2029	61
3.3 Strategi Disparmudora dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	67

3.4 Arah Kebijakan Disparmudora dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	69
---	----

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Strategis, dan Arah Kebijakan Disparmudora	71
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Disparmudora	102

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	104
5.2 Kaidah Pelaksanaan	104
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	106

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Eselon
Tabel	2.2	Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel	2.3	Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Pendidikan
Tabel	2.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Disparmudora
Tabel	2.5	Capaian Indikator Kinerja Kunci Disparmudora
Tabel	2.6	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Disparmudora
Tabel	2.7	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Tabel	2.8	Persentase Wirausaha Muda
Tabel	2.9	Capaian Pembinaan Olahraga
Tabel	2.10	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat
Tabel	2.11	Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Tabel	2.12	Jumlah Atlet Berprestasi
Tabel	2.13	Jumlah Prestasi Olahraga
Tabel	2.14	Jumlah Kunjungan Wisatawan
Tabel	2.15	Lama Kunjungan Wisatawan Kabupaten Luwu Timur
Tabel	2.16	Pemetaan Permasalahan Disparmudora
Tabel	2.17	Teknik Penyimpulan Isu Strategis Disparmudora
Tabel	3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disparmudora Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2030
Tabel	3.4	Penahapan Renstra Disparmudora Kabupaten Luwu Timur
Tabel	3.5	Arah Kebijakan Renstra Disparmudora
Tabel	4.1	Program Disparmudora Kabupaten Luwu Timur
Tabel	4.2	Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Disparmudora
Tabel	4.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Disparmudora
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Utama Disparmudora
Tabel	4.6	Indikator Kinerja Kunci Disparmudora

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Nasional, serta regulasi perencanaan yang berlaku, termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029.

Disparmudora memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, mencetak generasi muda yang unggul, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga. Tiga bidang tersebut memiliki keterkaitan strategis yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), penciptaan lapangan kerja, serta penguatan jati diri dan karakter bangsa.

Namun demikian, pelaksanaan pelayanan publik di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah; rendahnya daya saing destinasi wisata, terbatasnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, minimnya fasilitas olahraga, serta keterbatasan sumber daya baik dari sisi anggaran, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Permasalahan tersebut menuntut adanya perencanaan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan terukur.

Renstra ini disusun untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan selama lima tahun ke depan (tahun 2025-2029), sehingga seluruh masalah yang terpetakan di atas dapat diselesaikan/teratas. Dokumen ini juga menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan pembangunan antar-periode serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Melalui Renstra ini, Disparmudora berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mengembangkan program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Diharapkan, dokumen ini dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan sektor pariwisata yang berdaya saing, pemuda yang berdaya, serta masyarakat yang sehat dan produktif melalui olahraga.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Disparmudora berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

- (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 341);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168);
 21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya daerah secara optimal. Dokumen ini menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Disparmudora adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan program strategis di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga.
2. Menyusun langkah-langkah strategis dan operasional untuk minikitchen kualitas pengembangan pariwisata daerah, pemberdayaan pemuda, serta pembinaan dan pengembangan olahraga.

3. Menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dinas.
4. Menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
5. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari lima bab utama sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Disparmudora Kabupaten Luwu Timur periode 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah, Mitra PD dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD jika ada, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan isu strategis daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi serta arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya

yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V PENUTUP, memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Untuk dapat merumuskan sebuah rencana strategis yang relevan dan dapat dicapai, langkah awal yang fundamental adalah melihat kondisi internal dan eksternal Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) secara komprehensif. Bab ini menyajikan analisis mendalam mengenai Disparmudora Kabupaten Luwu Timur, yang diawali dengan gambaran umum pelayanan yang mencakup tugas pokok, sumber daya, dan capaian kinerja. Selanjutnya, bab ini akan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta merumuskannya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi fokus utama dalam periode perencanaan 2025-2029.

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka tugas pokok Disparmudora adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga. Disparmudora Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (P3Ekraf)
- d. Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata (KPDP)
- e. Bidang Kepemudaan
- f. Bidang Keolahragaan
- g. Kelompok Fungsional

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Disparmudora adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan otonomi daerah di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka pelaksaaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan tugas, Disparmudora mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan urusan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disparmudora Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Disparmudora Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan pengembangan destinasi pariwisata;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan;
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keolahragaan;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Dinas:

1. Perumusan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan pengembangan destinasi pariwisata;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan;
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keolahragaan;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, keuangan dan umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretaris Dinas:

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif:

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi pariwisata;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

d. Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pariwisata, kemitraan dan pengembangan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata:

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan pengembangan industri pariwisata; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

e. Bidang Kepemudaan

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, infrastruktur, dan kemitraan pemuda.

Fungsi Kepala Bidang Kepemudaan:

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Bidang Keolahragaan

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Bidang Keolahragaan:

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.

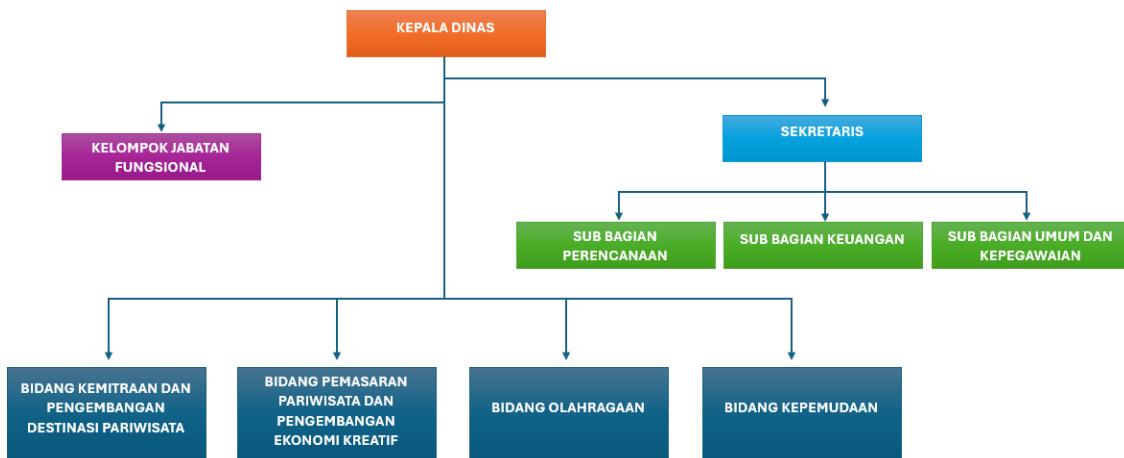
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya . Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara efektif, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur didukung oleh struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas, sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 1
**Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Luwu Timur**



Sumber: Perup no 86 tahun 2021 Disparmudora

2.1.2. Sumber Daya Dispermudora

Untuk menjalankan struktur organisasi serta tugas dan fungsi yang kompleks tersebut, Dispermudora didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Ketersediaan dan kualitas kedua jenis sumber daya ini menjadi faktor penentu keberhasilan Dispermudora dalam mencapai tujuannya.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas berfungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi di bidang pengembangan destinasi dan promosi pariwisata, pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan, serta peningkatan partisipasi dan prestasi olahraga. Selain itu, dinas juga melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi program serta penyelenggaraan administrasi perkantoran guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.

Tahun 2025, total jumlah personil pada Dispermudora sebanyak 67 orang. Untuk memahami komposisi dan kapasitas modal manusia ini secara lebih rinci, data

kepegawaian dapat diklasifikasikan berdasarkan eselon, jenis kelamin, kepangkatan, dan tingkat pendidikan, sebagaimana disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Eselon Tahun 2025

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II/b	1
2	Sekretaris	III/a	1
3	Kepala Bidang	III/b	4
4	Kepala Sub Bagian	IV/a	3
5	Jabatan Fungsional	-	12
6	Staf ASN	-	43
8	<i>Cleaning Service, Sopir, dan Security</i>	-	13
	Jumlah		77

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Disparmudora Tahun 2025

Berdasarkan data kepegawaian Tahun 2025, jumlah keseluruhan pegawai pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga sebanyak 64 orang yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Dari total tersebut, jabatan struktural meliputi 1 orang Kepala Dinas dengan eselon II/b, 1 orang Sekretaris dengan eselon III/a, 4 orang Kepala Bidang dengan eselon III/b, serta 3 orang Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/a. Selain itu, terdapat 3 orang pejabat fungsional, 43 orang staf ASN, dan untuk mendukung operasional perkantoran, juga terdapat 13 tenaga pendukung yang terdiri dari petugas kebersihan, sopir, dan tenaga keamanan. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga telah mencakup unsur manajerial, pelaksana teknis, serta tenaga pendukung yang berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Tabel 2.2
Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	STRUKTUR	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris	-	1
3	Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	4	1
4	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	3	2
5	Bidang Kepemudaan	4	11
6	Bidang Olahraga	6	11
7	Sub Bagian Perencanaan	1	3
8	Sub Bagian Keuangan	-	5
9	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4	7
	Jumlah	23	38

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Disparmudora Tahun 2025

Pada tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa Berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, terdapat 64 orang pegawai, yang terdiri atas 23 laki-laki dan 38 perempuan. Kepala Dinas dijabat oleh 1 orang perempuan, demikian pula jabatan Sekretaris diisi oleh 1 orang perempuan. Pada Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata terdapat 4 laki-laki dan 1 perempuan, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri atas 3 laki-laki dan 2 perempuan, sedangkan Bidang Kepemudaan memiliki 4 laki-laki dan 11 perempuan. Selanjutnya, Bidang Olahraga diisi oleh 6 laki-laki dan 11 perempuan, Sub Bagian Perencanaan terdiri atas 1 laki-laki dan 3 perempuan, Sub Bagian Keuangan berjumlah 4 perempuan, dan Sub Bagian Umum serta Kepegawaian terdiri atas 4 laki-laki dan 7 perempuan. Komposisi ini menunjukkan keterwakilan dan partisipasi aktif pegawai laki-laki maupun perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga secara profesional dan berkesinambungan.

Tabel 2.3
Jumlah ASN dan Non ASN
berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2025

NO	JABATAN	S2	S1	D3	SLTA
1	Kepala Dinas	1			
2	Sekretaris	1			
3	Kepala Bidang	2	2		
4	Kepala Sub Bagian	1	2		
5	Jabatan Fungsional	1	12		
6	Staf ASN	1	27	3	11
7	<i>Cleaning Service, Sopir, dan Security</i>				13
	JUMLAH	7	44	3	24

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Disparmudora Tahun 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga pada Tahun 2025 sebanyak 64 orang dengan komposisi pendidikan yang beragam. Pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 berjumlah 7 orang, S1 sebanyak 44 orang, D3 sebanyak 3 orang, dan SLTA sebanyak 11 orang. Jabatan pimpinan seperti Kepala Dinas dan Sekretaris masing-masing memiliki kualifikasi S2, sementara sebagian besar Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan pejabat fungsional memiliki kualifikasi S1. Pada kelompok staf ASN didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 44 orang, disusul SLTA sebanyak 11 orang, serta beberapa dengan kualifikasi S2 dan D3 sedangkan tenaga pendukung seperti cleaning service, sopir, dan security umumnya berpendidikan SLTA. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki tingkat pendidikan tinggi yang mendukung profesionalitas dan kualitas kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga.

2.1.2.2. Sumberr Daya Sarana Prasarana

Selain didukung oleh SDM yang kompeten, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Disparmudora juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana merujuk pada peralatan operasional seperti kendaraan dinas dan perlengkapan kantor, sedangkan prasarana mencakup infrastruktur pendukung seperti gedung kantor. Keduanya memiliki fungsi vital dalam mendukung operasional, meningkatkan efisiensi, serta menjamin keamanan data dan aset.

Perlengkapan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kinerja pemerintahan sehari-hari. Berikut adalah rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki Disparmudora

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Tahun 2025

NO	KATEGORI/JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN
A	ASET TIDAK BERGERAK		
1	Tanah	13	Unit
2	Gedung dan Bangunan	105	Unit
3	Jalan, Irigasi dan jalan	19	
B	PERALATAN DAN MESIN		
1	Alat Besar		
	Peralatan selam lainnya	2	Unit
2	Komputer		
	PC. Unit	7	Unit
	Laptop	28	Unit
	Note book	2	Unit
	Tablet PC	1	Unit
	Printer	27	Unit
	Keyboard	1	Unit
	Monitor	2	Unit
3	Alat Keselamatan Kerja		
	Tenda	1	Unit
4	Peralatan Proses/Produksi		
	Drum	1	Unit
5	Peralatan Olahraga		
	Alat tenis meja	1	Unit
	Alat badminton	1	Unit
	Alat dayung	40	Unit
	Peralatan olahraga lainnya	15	Unit
6	Alat Angkutan		
	Kendaraan Dinas Roda 4	3	Unit
	Kendaraan Dinas Roda 2	11	Unit
	Gerobak tarik	3	Unit
	Perahu tradisional	6	Unit
7	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	Scanner	1	Unit
8	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Lemari besi/metal	10	Unit
	Lemari kayu, lemari arsip, lemari kaca, filling cabinet	37	Unit
	Rak besi, rak kayu	12	Unit
	Brandkas	1	Unit
	Papan visula/papan nama	47	Unit
	Focusing screen/layar LCD projector	3	Unit
	Papan pengumuman	35	Unit
	Teralis	1	Unit
	Meja kerja kayu, meja kerja pejabat	48	Unit
	Meja resepsi	1	Unit

	Kursi kerja, kursi rapat, kursi putar	90	Unit
	Kursi tamu	2	Unit
	Kursi besi/metal	2	Unit
	Sofa	1	Unit
	Mesin pemotong rumput	7	Unit
	Kulkas/Lemari es	2	Unit

Sumber : Pengurus Barang tahun 2025

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga memiliki berbagai jenis aset yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan data Tahun 2025, aset yang dimiliki terdiri atas aset tidak bergerak dan peralatan serta mesin. Aset tidak bergerak meliputi 13 unit tanah, 105 unit gedung dan bangunan, serta 19 unit jalan, irigasi, dan jaringan. Sementara itu, kategori peralatan dan mesin mencakup berbagai sarana kerja dan operasional, antara lain peralatan komputer sebanyak 68 unit (terdiri dari PC, laptop, notebook, printer, dan perangkat pendukung lainnya), peralatan olahraga sebanyak 57 unit, serta alat angkutan sebanyak 23 unit berupa kendaraan dinas, gerobak, dan perahu tradisional. Selain itu, terdapat berbagai peralatan kantor dan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, papan visual, serta peralatan pendukung lainnya yang berjumlah lebih dari 200 unit.

Secara keseluruhan, komposisi aset tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan administrasi, pembinaan pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan di daerah.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dispermudora

Efektivitas sebuah organisasi pada akhirnya diukur dari kinerjanya. Kinerja pelayanan Dispermudora sebagai penanggung jawab kepariwisataan, pemuda dan olahraga dapat dievaluasi melalui beberapa indikator kunci.

2.1.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja pada Dispermudora Kabupaten Luwu Timur juga diukur melalui ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode sebelumnya.

Kinerja Dispermudora Kabupaten Luwu Timur dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD).

Berdasarkan Rencana Strategis Dispermudora Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024, terdapat 4 (Empat) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat

daerah, berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	TARGET					CAPAIAN				
				2022	2022	2023	2024	2026	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</i>													
1.	Percentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	Jumlah Wirausaha Muda yang Aktif/Seluruh Wirausaha Muda X 100	35,50	35,50	35,71	38,83	40,45	35,60	37,22	43,47		
2.	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	Jumlah Atlet yang Mendapatkan Penghargaan pada Event tingkat Provinsi dan Nasional	10	10	15	20	94	21	26	94		
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	Jumlah Pengunjung pada Objek Wisata yang diKelola oleh Pemda dan Desa di Kabupaten Luwu Timur	32.000	32.000	33.000	410.000	420.000	120.250	406.532	410.816		
4.	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai Lakip			63	68	70		71,55	73,30		

Sumber : Data Bagian Perencanaan tahun 2025

Berdasarkan data capaian kinerja, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga memiliki empat indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2022–2026.

Pertama, indikator persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan tren peningkatan dari 35,50% pada tahun 2022 menjadi 40,45% pada tahun 2026, yang menggambarkan peningkatan keterlibatan pemuda dalam aktivitas kewirausahaan.

Kedua, indikator jumlah atlet berprestasi juga mengalami peningkatan signifikan, dari 10 atlet pada tahun 2022 menjadi 94 atlet pada tahun 2026, menandakan keberhasilan pembinaan dan pelatihan olahraga daerah.

Ketiga, indikator jumlah kunjungan wisatawan memperlihatkan pertumbuhan pesat, dari 32.000 kunjungan pada tahun 2022 menjadi 420.000 kunjungan pada tahun 2026, mencerminkan peningkatan daya tarik dan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Luwu Timur.

Terakhir, nilai SAKIP meningkat secara konsisten dari 63 pada tahun 2022 menjadi 73,30 pada tahun 2026, yang menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi.

Secara keseluruhan, tren peningkatan pada seluruh indikator kinerja menggambarkan komitmen Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga dalam

mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga yang berdaya saing serta berkelanjutan.

2.1.3.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan perangkat daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing program yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan indikator kinerja kunci Disparmudora pada tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Kepemudaan dan Olah Raga												
1	Percentase organisasi pemudah yang aktif	%	39,33	44,94	50,56	56,18	61,80	42,7	50	90	-	-
2	persentase wirausaha muda	%	35,60	37,22	38,83	40,45	42,07	46,43	35,71	43,47	-	-
3	Cakupan pembinaan olaraga	%	100	100	100	100	100	74,07	100	100	-	-
4	Cakupan palatih yang bersertifikat	%	55,71	67,14	78,57	90,00	100,00	11,76	0	15	-	-
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86	100	32,2	31,77	-	-
6	Jumlah atlet berprestasi	Atlit	10	15	20	20	20	21	76	53	-	-
7	Jumlah prestasi olaraga	Cabor	4	5	6	7	7	197	213	105	-	-
Pariwisata												
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	-	-	-	-	-	1,12	1,18	1,31	-	-
9	Kunjungan wisata	Orang	32.000	33.000	410.000	420.000	430.000	939,45	1.220,71	100,2	-	-
10	Lama kunjungan wisata	Hari	3	4	5	7	7	3	3	3	-	-
11	PAD sektor pariwisata	%	1,12	1,18	1,31	1,44	1,44			2,47%	-	-

Sumber : Data Bagian Perencanaan tahun 2025

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga memiliki serangkaian indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pembangunan daerah di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga, sebagian besar indikator menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan dari 42,7% pada tahun 2022 menjadi 90% pada tahun 2024, menunjukkan semakin tingginya partisipasi generasi muda dalam kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan. Persentase wirausaha muda juga cenderung meningkat dengan capaian 46,43% pada tahun 2022, mengindikasikan tumbuhnya semangat kemandirian ekonomi di kalangan pemuda. Selain itu, cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda telah mencapai tingkat maksimal pada tahun-tahun terakhir, meskipun cakupan pelatih bersertifikat masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target 100% pada tahun 2026.

Sementara itu, pada Bidang Pariwisata, indikator kinerja menunjukkan tren positif terutama pada kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan jumlah kunjungan wisatawan. Capaian jumlah kunjungan wisata meningkat signifikan dari 939 wisatawan pada tahun 2022 menjadi lebih dari 1.220 wisatawan pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan promosi dan pengelolaan destinasi wisata yang lebih baik. Selain itu, lama kunjungan wisata yang relatif stabil serta peningkatan PAD sektor pariwisata hingga 2,47% pada tahun 2024 menunjukkan kontribusi nyata sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga telah berupaya optimal dalam meningkatkan partisipasi pemuda, prestasi olahraga, serta pertumbuhan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi dan sosial Kabupaten Luwu Timur.

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana organisasi-organisasi kepemudaan di suatu daerah berfungsi secara aktif sesuai tujuan pembentukannya. Persentase organisasi pemuda yang aktif dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Persentase organisasi pemuda yang aktif

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	OKP	30	38	38	50	90
2.	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	OKP	74	89	89	100	100
3.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	40,54	42,69	42,7	50	90

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan perkembangan jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Luwu Timur selama periode 2020–2024. Jumlah organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan signifikan dari **30 organisasi pada tahun 2020** menjadi **90 organisasi pada tahun 2024**. Hal ini sejalan dengan peningkatan persentase organisasi pemuda aktif dari **40,54% pada tahun 2020** menjadi **90% pada tahun 2024**. Capaian ini menggambarkan adanya peningkatan kesadaran, partisipasi, dan semangat generasi muda dalam berorganisasi serta dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi kegiatan kepemudaan yang produktif dan berkelanjutan.

Persentase Wirausaha Muda adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pemuda di suatu wilayah yang telah menjalankan kegiatan kewirausahaan atau memiliki usaha sendiri, baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah. Persentase wirausaha muda dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Persentase Wirausaha Muda

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wirausaha Muda yang aktif	Orang	13	30	26	20	30
2	Jumlah Seluruh Wirausaha Muda	Orang	19	50	56	56	69
3	Persentase Wirausaha Muda	%	68,42	60	46,43	35,71	43,47

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah wirausaha muda di Kabupaten Luwu Timur mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Meskipun total jumlah wirausaha muda meningkat dari **19 orang pada tahun 2020** menjadi **69 orang pada tahun 2024**, persentase wirausaha muda yang aktif cenderung menurun dari **68,42% pada tahun 2020** menjadi **43,47% pada tahun 2024**. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan minat pemuda dalam berwirausaha, namun belum seluruhnya dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif agar wirausaha muda dapat mengembangkan usaha secara konsisten dan berdaya saing.

Cakupan Pembinaan Olahraga merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana kegiatan pembinaan olahraga dilakukan terhadap kelompok atau individu yang menjadi sasaran, baik pada tingkat sekolah, desa, kecamatan, maupun kabupaten. Indikator ini penting karena mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi atlet sejak dini, serta membangun sistem olahraga yang berkelanjutan dan berprestasi. Cakupan pembinaan olahraga dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Cakupan Pembinaan Olahraga

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	Cabor	0	2	20	28	29
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	21	25	27	28	29
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	0	8,00	74,07	100	100

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Data pada tabel menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembinaan cabang olahraga di Kabupaten Luwu Timur selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 belum ada cabang olahraga yang dibina secara aktif, namun jumlah tersebut meningkat menjadi **29 cabang olahraga** pada tahun 2024, dengan **cakupan pembinaan mencapai 100%** dari seluruh cabang yang terdaftar. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pembinaan olahraga, memperkuat kelembagaan keolahragaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, dan berprestasi.

Cakupan Pelatih yang Bersertifikat merupakan ukuran persentase jumlah pelatih olahraga yang telah memiliki sertifikat resmi dibandingkan dengan total pelatih yang aktif dan terdata di suatu wilayah. Sertifikasi pelatih biasanya dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti KONI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, atau lembaga pelatihan yang diakui, dan menjadi bukti bahwa pelatih tersebut telah mengikuti pelatihan, ujian kompetensi, serta memiliki kualifikasi dan kemampuan sesuai standar nasional atau internasional. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembinaan atlet dilakukan oleh pelatih yang kompeten, profesional, dan memiliki standar keilmuan yang memadai. Semakin tinggi cakupan pelatih yang bersertifikat, maka semakin tinggi pula mutu pembinaan olahraga yang dapat diberikan. Indikator ini penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas atlet dan prestasi olahraga daerah. Kenaikan cakupan pelatih yang bersertifikat dari tahun ke tahun juga menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan

kapasitas sumber daya manusia di bidang olahraga. Ini bisa dicapai melalui program pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pelatihan kepelatihan. Cakupan pelatih yang bersertifikat dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelatih Bersertifikat	Orang	40	40	20	0	30
2	Jumlah Seluruh Pelatih	Orang	153	153	170	170	200
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	26,14	26,14	11,76	0	15

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah pelatih olahraga yang memiliki sertifikasi di Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020–2021 terdapat **40 pelatih bersertifikat** dengan cakupan **26,14%**, namun angka tersebut menurun tajam menjadi **11,76% pada tahun 2022** dan bahkan **0% pada tahun 2023** akibat belum adanya pelatihan sertifikasi baru. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi **15%**, seiring dengan dilaksanakannya program pembinaan dan pelatihan bagi pelatih daerah. Data ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan program sertifikasi guna menjamin kualitas dan profesionalitas tenaga pelatih olahraga dalam mendukung peningkatan prestasi atlet di daerah.

Cakupan Pembinaan Atlet Muda merupakan ukuran yang menunjukkan persentase jumlah atlet muda yang telah dibina secara aktif dibandingkan dengan total keseluruhan atlet muda yang terdata dalam suatu wilayah atau lembaga pembinaan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program pembinaan yang dilaksanakan mampu menjangkau dan membina potensi atlet muda yang ada. Semakin tinggi persentasenya, semakin luas pula cakupan layanan pembinaan yang diberikan, yang mencerminkan keberhasilan dalam menjaring, melatih, dan mengembangkan potensi atlet muda secara merata. Indikator ini penting sebagai dasar evaluasi efektivitas

program pembinaan olahraga usia dini, serta menjadi tolak ukur untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung regenerasi atlet secara berkelanjutan. Cakupan pembinaan atlet muda dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Cakupan Pembinaan Atlet Muda

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Atlet	0	0	40	95	95
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	Atlet	40	40	40	295	299
3	Cakupan pembinaan Atlet Muda	%	0	0	100	32,20	31,77

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Data pada tabel menunjukkan perkembangan pembinaan atlet muda di Kabupaten Luwu Timur dalam kurung waktu 2020–2024. Pada tahun 2020–2021 belum terdapat program pembinaan atlet pelajar yang aktif, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dengan **40 atlet pelajar dibina**, mencakup **100% dari total atlet yang ada**. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan fluktuasi, di mana jumlah atlet binaan meningkat menjadi **95 orang pada 2023 dan 2024**, namun persentase cakupan pembinaan menurun menjadi sekitar **32%**. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah keseluruhan atlet pelajar yang cukup signifikan. Secara umum, capaian ini menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas basis pembinaan atlet muda sebagai upaya membangun generasi berprestasi di bidang olahraga.

Jumlah atlet berprestasi merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan banyaknya atlet yang berhasil meraih prestasi dalam ajang perlombaan atau pertandingan olahraga, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Indikator ini mencerminkan hasil dari proses pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi olahraga. Tingginya jumlah atlet berprestasi menjadi cerminan keberhasilan program pengembangan dan pembinaan atlet, serta kualitas pelatih, fasilitas, dan kompetisi yang tersedia. Indikator ini juga penting sebagai bahan evaluasi untuk melihat efektivitas program pembinaan olahraga serta sebagai dasar untuk perencanaan program ke depan, termasuk pemberian penghargaan dan pembinaan lanjutan bagi atlet yang berpotensi. Secara umum, peningkatan jumlah atlet berprestasi menunjukkan bahwa iklim pembinaan olahraga berjalan dengan baik, sedangkan stagnasi atau penurunan perlu menjadi perhatian khusus, terutama dalam hal kualitas pelatihan, kompetisi, atau dukungan sarana dan prasarana. Jumlah atlet berprestasi dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Jumlah Atlet Berprestasi

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Atlet	30	74	21	76	53

umber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Jumlah atlet Kabupaten Luwu Timur yang berhasil meraih prestasi pada ajang kejuaraan tingkat nasional maupun internasional menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 terdapat **30 atlet berprestasi**, kemudian meningkat tajam menjadi **74 atlet pada tahun 2021**. Namun, capaian tersebut sempat menurun menjadi **21 atlet pada tahun 2022**, sebelum kembali naik menjadi **76 atlet pada tahun 2023**, dan sedikit menurun menjadi **53 atlet pada tahun 2024**. Fluktuasi ini menggambarkan adanya variasi tingkat partisipasi dan kompetisi pada setiap tahunnya, sekaligus menunjukkan potensi besar yang dimiliki daerah dalam mencetak atlet unggulan. Upaya pembinaan berkelanjutan, pelatihan intensif, dan dukungan sarana olahraga menjadi faktor penting untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa mendatang.

Jumlah Prestasi Olahraga mengukur banyaknya cabang olahraga yang berhasil meraih prestasi dalam kurun waktu tertentu, seperti satu tahun. Berbeda dengan indikator yang menghitung jumlah atlet atau jumlah medali, indikator ini berfokus pada jumlah cabang olahraga yang berkontribusi terhadap prestasi, bukan kuantitas medali atau atlet yang menang. Indikator ini penting untuk menunjukkan penyebaran prestasi secara lintas cabang olahraga. Semakin banyak cabang yang berprestasi, semakin menggambarkan keberhasilan pembinaan yang merata dan tidak hanya terpusat pada satu atau dua jenis olahraga saja. Hal ini bisa menjadi dasar kebijakan dalam perencanaan pengembangan olahraga daerah, seperti peningkatan anggaran untuk cabang yang potensial, pelatihan pelatih, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Jumlah prestasi olahraga dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Jumlah Prestasi Olahraga

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Prestasi cabang olahraga yang menangkan dalam satu tahun	Medali	3	3	6	7	7

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Selama periode 2020–2024, prestasi cabang olahraga di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah medali yang diraih sebanyak **3 medali**, kemudian meningkat menjadi **6 medali pada tahun 2022**, serta mencapai **7 medali pada tahun 2023 dan 2024**. Capaian ini menggambarkan peningkatan kualitas pembinaan olahraga serta efektivitas program pelatihan atlet yang dijalankan oleh pemerintah daerah bersama dengan organisasi olahraga. Konsistensi peningkatan prestasi tersebut menjadi indikator positif terhadap keberhasilan pengembangan keolahragaan di daerah dalam mencetak atlet yang berdaya saing dan berprestasi di berbagai kejuaraan.

Jumlah Kunjungan Wisatawan merupakan salah satu indikator kunci dalam sektor pariwisata yang menggambarkan tingkat daya tarik dan keberhasilan dalam mempromosikan serta mengelola destinasi wisata. Indikator ini mencatat berapa banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang datang dan mengunjungi

berbagai objek wisata. Jumlah kunjungan wisatawan dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Jumlah kunjungan wisatawan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata sekabupaten dan kota	Orang	8.978	36.990	300.625	402.836	410.816
2	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan sekabupaten dan kota	Orang	27.500	30.000	32.000	33.000	410.000
3	Kunjungan wisata	%	32,64	123,30	939,45	1.220,71	100,20

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Data pada tabel menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Luwu Timur selama periode 2020–2024. Jumlah kunjungan wisata meningkat drastis dari **8.978 orang pada tahun 2020** menjadi **410.816 orang pada tahun 2024**, atau mengalami pertumbuhan lebih dari **45 kali lipat** dalam lima tahun terakhir.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan destinasi wisata, promosi pariwisata, serta sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat berhasil meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022–2023 dengan persentase capaian yang jauh melampaui target, masing-masing mencapai **939,45%** dan **1.220,71%** dari rencana.

Meskipun pada tahun 2024 capaian kembali pada angka **100,20%** (lebih realistik dan stabil), hal ini menandakan adanya keseimbangan antara target yang

disusun dengan potensi riil pariwisata di daerah. Ke depan, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi, penguatan ekonomi kreatif lokal, serta pengembangan wisata berkelanjutan untuk mempertahankan tren positif tersebut.

Lama Kunjungan Wisata merupakan ukuran yang menggambarkan rata-rata durasi waktu yang dihabiskan oleh wisatawan selama melakukan kunjungan di destinasi wisata. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam satuan hari, dan menjadi salah satu parameter penting untuk menilai tingkat daya tarik, kenyamanan, dan kualitas layanan pariwisata di suatu wilayah. Semakin lama wisatawan tinggal, maka semakin besar potensi dampak ekonominya terhadap pelaku usaha lokal, seperti hotel, restoran, transportasi, dan pelaku ekonomi kreatif. Oleh karena itu, lama kunjungan wisata menjadi indikator penting dalam perencanaan pengembangan pariwisata, karena dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan destinasi yang menarik dan fasilitas penunjang yang memadai. Indikator ini juga membantu mengevaluasi efektivitas promosi pariwisata dan kualitas paket wisata yang ditawarkan. Lama kunjungan wisatawan dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Lama kunjungan wisatawan kab. Lutim tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata rata kunjungan wisatawan dalam satu tahun	Hari	3	3	3	3	3

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Luwu Timur tercatat stabil selama lima tahun terakhir, yaitu 3 hari per wisatawan. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan memilih untuk tinggal dalam waktu singkat, umumnya untuk kegiatan rekreasi akhir pekan, kunjungan keluarga, maupun perjalanan singkat ke destinasi alam dan budaya.

Kestabilan lama kunjungan ini mencerminkan bahwa meskipun jumlah wisatawan meningkat tajam dalam lima tahun terakhir, durasi kunjungan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Ke depan, Pemerintah Daerah dapat mendorong pengembangan paket wisata terpadu, peningkatan fasilitas akomodasi, serta promosi

event dan atraksi wisata unggulan agar wisatawan terdorong untuk memperpanjang masa tinggal mereka dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga, Disparmudora menetapkan kelompok sasaran layanan yang menjadi prioritas utama program dan kegiatan lima tahun ke depan. Penetapan kelompok sasaran ini didasarkan pada kebutuhan spesifik layanan publik dan strategi pelayanan yang dirancang secara adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan satuan kerja. Adapun untuk Disparmudora Kabupaten Luwu Timur kelompok sasaran ini meliputi :

Kelompok sasaran pembangunan Bidang Pariwisata :

1. Wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara
2. Pelaku pariwisata (seperti pengelola desa wisata, penyedia jasa hotel, restoran/rumah makan, pemandu wisata dan biro perjalanan wisata/travel)
3. Pelaku ekonomi kreatif (sektor kuliner, kriya, fashion, periklanan, fotografi, musik, TV dan radio, arsitektur, penerbitan, film animasi dan video, seni pertunjukan, desain produk, aplikasi dan pengembangan permainan, serta seni rupa)
4. Objek wisata
5. Sarana dan prasarana pariwisata

Kelompok sasaran pembangunan bidang Kepemudaan :

1. Pemuda usia 16-30 tahun
2. Organisasi kepemudaan
3. Wirausaha pemuda (wirausaha pemula maupun mapan)
4. Sarana dan prasarana kepemudaan

Kelompok sasaran pembangunan bidang Keolahragaan :

1. Organisasi keolahragaan (KONI dan KORMI)
2. Pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum
3. Masyarakat berkebutuhan khusus
4. Atlet dan calon atlet berprestasi
5. Tenaga keolahragaan (Pelatih, juri, wasit dan instruktur)
6. Sarana dan prasarana keolahragaan

2.1.5. Mitra Disparmudora Kabupaten Luwu Timur dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Disparmudora senantiasa membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, swasta, komunitas, maupun masyarakat umum. Mitra-mitra tersebut berperan penting dalam memperkuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berikut mitra-mitra dimaksud:

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan

Bentuk kerja sama ini meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan program, pembinaan destinasi, serta promosi pariwisata daerah. Melalui kemitraan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam memberikan pembinaan, fasilitasi, serta dukungan teknis dan kebijakan terhadap pengembangan potensi wisata di Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu, Disparmudora Luwu Timur berperan sebagai pelaksana di tingkat kabupaten, yang menyesuaikan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pariwisata provinsi.

- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam bidang kepemudaan, kemitraan ini meliputi pembinaan organisasi kepemudaan, peningkatan partisipasi dan kreativitas pemuda, serta fasilitasi kegiatan kewirausahaan muda dan kepemimpinan pemuda. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dukungan pembinaan, pelatihan, serta pendampingan teknis, sementara Disparmudora Luwu Timur bertugas sebagai pelaksana kegiatan di tingkat daerah. Di bidang olahraga, kerja sama ini berfokus pada pengembangan atlet berprestasi, pelatihan pelatih bersertifikat, pembinaan cabang olahraga potensial, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga daerah. Selain itu, kedua instansi berkolaborasi dalam penyelenggaraan event olahraga tingkat provinsi dan regional, serta kegiatan pembinaan generasi muda melalui olahraga prestasi maupun rekreasi.

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) Kabupaten Luwu Timur menjalin kemitraan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan Disparmudora Luwu Timur selaras dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD, Renstra, dan RPJMD. Melalui kemitraan ini, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi terhadap proses perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten, termasuk penyelarasan indikator kinerja utama (IKU), sasaran pembangunan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. Selain itu, Bappelitbangda juga mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data dan analisis ilmiah.

b. Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah

- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida): Berperan dalam perencanaan, penelitian, dan pengembangan sektor pariwisata, kepemudaan dan olahraga. Bapperida menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang menjadi acuan semua OPD (salah satunya bagi, Pemuda, dan Olahraga), dalam menyusun rencana strategis dan program kerja.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PU & PR): berperan dalam pembangunan infrastruktur terkait pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Disparmudora bertugas merencanakan dan mengembangkan potensi daerah di bidang-bidang tersebut, sementara Dinas PU & PR bertanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukungnya, seperti jalan, jembatan, fasilitas olahraga, dan tempat wisata.

- Dinas Perhubungan (Dishub): Berperan dalam hal aksesibilitas dan mobilitas. Dishub bertanggung jawab atas transportasi dan infrastruktur jalan yang mendukung pergerakan wisatawan, pemuda, dan atlet. Sinergi antara ketiga dinas ini krusial untuk pengembangan pariwisata olahraga dan kegiatan kepemudaan yang berkelanjutan.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud): Berperan dalam pengembangan pariwisata, kepemudaan, dan olahraga melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pelestarian budaya. Sebaliknya, pariwisata, kepemudaan, dan olahraga juga dapat memberikan kontribusi positif bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seperti peningkatan kesadaran budaya, pengembangan potensi pemuda, dan promosi gaya hidup sehat.
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos): Terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Dinsos dapat berperan dalam memastikan manfaat pariwisata, kegiatan kepemudaan, dan olahraga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Selain itu, Dinsos juga dapat terlibat dalam program-program yang mendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga untuk meningkatkan kesehatan, keterampilan, dan partisipasi sosial masyarakat
- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disdagkop): Merupakan mitra dalam mendukung pertumbuhan pariwisata melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan pariwisata, serta mempromosikan produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Selain itu, Dinas Koperindag juga dapat berperan dalam menjaga kualitas produk dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha pariwisata.
- Dinas Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan): Memiliki hubungan yang tidak langsung namun penting dengan pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Dinas Perkimtan bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti perumahan, sanitasi, dan tata ruang wilayah. Infrastruktur yang baik dari Dinas Perkimtan mendukung kegiatan pariwisata dengan menyediakan akomodasi yang layak, sanitasi yang baik di kawasan wisata, dan tata

ruang yang mendukung pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, penataan kawasan permukiman yang baik juga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik bagi wisatawan.

- Dalam konteks kepemudaan, Dinas Perkimtan dapat berperan dalam menyediakan perumahan terjangkau bagi pemuda, serta dalam penataan ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kepemudaan. Fasilitas publik yang memadai dan aman, yang merupakan tanggung jawab Dinas Perkimtan, juga dapat mendukung kegiatan olahraga dan rekreasi bagi pemuda.
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Sangat erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Pariwisata, kepemudaan, dan olahraga dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi antara ketiga sektor ini dengan DLH sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
- Dinas Pertanian dan ketahanan pangan (Distan): Dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama dalam konteks pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Distan dapat berperan dalam mendukung sektor pariwisata melalui penyediaan produk pertanian berkualitas, pengembangan agrowisata, dan pelibatan petani dalam kegiatan wisata
- Dinas Kelautan dan perikanan (DKP): Terutama dalam pengembangan pariwisata bahari dan olahraga air. DKP dapat mendukung pariwisata bahari dengan menjaga kelestarian ekosistem laut dan pantai, serta menyediakan fasilitas pendukung kegiatan wisata bahari. Kepemudaan dan olahraga dapat berperan dalam pengembangan potensi wisata bahari melalui kegiatan olahraga air dan pemberdayaan pemuda di sektor pariwisata bahari
- Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo): Memiliki peran penting dalam mendukung sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Hubungan ini terjalin melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk promosi, pengembangan potensi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan terkait

- Dinas Kesehatan: Berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat, termasuk wisatawan dan atlet, serta memastikan bahwa fasilitas dan kegiatan olahraga serta pariwisata memenuhi standar kesehatan. Sementara itu, pariwisata, kepemudaan, dan olahraga dapat menjadi sarana promosi kesehatan dan gaya hidup aktif, serta memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah
- c. Lembaga Vertikal di Daerah
 - KPH (Larona, Angkona, Kalaena): Terutama dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis alam dan kegiatan olahraga di area hutan. Keduanya dapat berkolaborasi dalam pengelolaan destinasi wisata alam, pelestarian lingkungan, serta penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga yang ramah lingkungan
 - BBKSDA Resort Towuti: Pariwisata berbasis alam dapat memanfaatkan keindahan dan potensi sumber daya alam yang dilindungi BKSDA, namun juga harus memperhatikan kelestariannya. Kepemudaan dan olahraga dapat berperan dalam kegiatan konservasi dan promosi pariwisata berkelanjutan. BKSDA sendiri memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi daya tarik pariwisata.
 - Kepolisian Resort: Berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di area pariwisata serta mendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) juga bekerja sama dengan Polres untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi wisatawan, pemuda, dan atlet
 - Badan Pusat Statistik (BPS): Terutama dalam menyediakan data dan statistik yang menjadi dasar bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan di ketiga sektor tersebut. Data ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami tren, potensi, dan tantangan yang ada, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran
- d. Sektor Swasta
 - ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia): Sebagai asosiasi agen perjalanan wisata, berperan dalam memajukan pariwisata Indonesia. Kepemudaan dan olahraga dapat menjadi daya tarik wisata, dan ASITA dapat memfasilitasi perjalanan wisata terkait kegiatan olahraga atau melibatkan pemuda. Selain itu, ASITA juga dapat bekerja

sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata yang berbasis pada pemuda dan olahraga

- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI): sebagai organisasi yang mewadahi industri perhotelan dan restoran, berperan penting dalam mendukung pengembangan pariwisata dan olahraga, terutama melalui penyediaan akomodasi dan fasilitas pendukung. Pemuda dan olahraga, di sisi lain, menjadi bagian integral dari ekosistem pariwisata, baik sebagai pelaku maupun target pasar
- HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia): Berperan dalam pengembangan pariwisata, yang juga berkaitan erat dengan kepemudaan dan olahraga. Kepemudaan dan olahraga bisa menjadi daya tarik wisata, sementara HPI sebagai wadah pramuwisata memastikan pengalaman wisata yang berkualitas
- Sponsor dan dunia usaha: Pariwisata dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan, kepemudaan dapat menjadi target pasar dan sumber daya, sedangkan olahraga dapat menjadi peluang bisnis dan citra positif perusahaan.
- Investor: saling terkait dan potensial untuk saling mendukung pengembangan. Pariwisata, khususnya sport tourism, dapat menarik minat investor untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas olahraga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik pariwisata daerah tersebut. Pemuda yang terlibat dalam kegiatan olahraga dan pariwisata dapat menjadi pelaku ekonomi kreatif dan sumber daya manusia yang berkualitas.

e. Organisasi Masyarakat dan Komunitas

- Organisasi Kepemudaan: seperti KNPI, Pemuda Pancasila, AMPI, dll: Organisasi kepemudaan dapat berperan aktif dalam memajukan sektor pariwisata dan olahraga, sementara sektor-sektor tersebut juga dapat memberikan wadah bagi pengembangan potensi pemuda.
- Komunitas Olahraga Prestasi: seperti klub sepak bola, basket, voli, atletik, dll: berperan langsung dalam pelaksanaan pembinaan atlet. Kemitraan antara Disparmudora dan komunitas olahraga sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan prestasi olahraga

- Komunitas Olahraga Rekreasi: Klub Senam, Panahan Tradisional, dll: Disparmudora berperan sebagai fasilitator dan regulator, sedangkan komunitas olahraga rekreasi berperan sebagai pelaksana dan penggerak kegiatan di lapangan.
 - Komunitas Budaya dan Seni lokal: Disparmudora memanfaatkan kebudayaan sebagai daya tarik wisata, sementara komunitas budaya berperan dalam pelestarian dan pengembangan budaya yang menjadi aset wisata. Keduanya bekerja sama untuk memajukan sektor pariwisata dan melestarikan warisan budaya daerah
 - Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS): Disparmudora sebagai pembina dan fasilitator, sementara Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) berperan sebagai penggerak dan pelaksana di lapangan. Keduanya bekerja sama untuk mengembangkan potensi wisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.
- f. Media Massa dan Platform Digital: menjadi sarana efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, menyampaikan informasi, dan memengaruhi persepsi publik tentang suatu destinasi wisata

Melalui kemitraan yang sinergis ini, Disparmudora berkomitmen untuk meningkatkan Daya Tarik Kepariwisataan, Partisipasi Kepemudaan dan Atlit Berprestasi sekaligus memperkuat integrasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Disparmudora

Setelah penyampaian gambaran umum kondisi Disparmudora, tahapan selanjutnya dalam perencanaan strategis adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan mendasar serta merumuskannya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan program. Proses ini dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan, sehingga rencana yang disusun dapat menjadi solusi yang tepat sasaran.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Disparmudora

Untuk merumuskan rencana strategis yang efektif, langkah awal yang krusial adalah mengidentifikasi dan memetakan seluruh permasalahan yang dihadapi. Proses ini dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara kinerja pelayanan yang diharapkan dengan kondisi riil di lapangan. Pemetaan ini tidak hanya mengidentifikasi

masalah di permukaan, tetapi juga menelusurnya hingga ke akar masalah, sehingga solusi yang dirancang nantinya dapat bersifat fundamental dan komprehensif.

Tabel berikut menyajikan pemetaan permasalahan pelayanan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Permasalahan tersebut dikelompokkan ke dalam empat masalah pokok, mulai dari efektivitas perencanaan APBD, efisiensi perpendaharaan, akurasi pelaporan, hingga optimalisasi pengelolaan aset. Dengan membedah setiap masalah pokok menjadi masalah yang lebih spesifik beserta akar penyebabnya, tabel ini menjadi landasan analisis untuk menentukan prioritas penanganan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disparmudora Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

Tabel 2.16
Pemetaan Permasalahan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan bidang pariwisata belum optimal	Belum meratanya pengembangan dan promosi destinasi wisata.- Fasilitas dan infrastruktur wisata masih terbatas.- Rendahnya kunjungan wisata di beberapa objek potensial.	Keterbatasan anggaran untuk pengembangan destinasi.- SDM pengelola wisata belum kompeten.- Belum maksimalnya kerja sama dengan pihak swasta dan komunitas pariwisata.- Promosi wisata belum berbasis digital secara optimal.
2	Partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah masih rendah	Kurangnya kegiatan yang melibatkan pemuda dalam organisasi sosial maupun ekonomi kreatif.- Rendahnya minat pemuda untuk berwirausaha.	Minimnya wadah pembinaan dan pendampingan pemuda.- Kurangnya dukungan modal dan pelatihan kewirausahaan muda.- Belum optimalnya sinergi antara Disparmudora dengan lembaga kepemudaan dan dunia usaha.
3	Pembinaan dan prestasi olahraga belum maksimal	Belum meratanya pembinaan atlet muda di seluruh wilayah.- Kurangnya pelatih bersertifikat dan fasilitas olahraga.	Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di tingkat desa/kelurahan.- Kegiatan pelatihan dan sertifikasi pelatih masih terbatas.- Minimnya anggaran untuk kegiatan pembinaan atlet secara berkelanjutan.
4	Kinerja kelembagaan dan pelayanan internal belum	Belum optimalnya koordinasi antar bidang.- Pelayanan administrasi dan pelaporan masih manual.- Kekurangan tenaga fungsional sesuai	Sistem informasi dan pelayanan digital belum terintegrasi.- Kapasitas SDM belum merata.- Keterbatasan anggaran operasional dan

	optimal	bidang.	pelatihan pegawai.
5	Belum maksimalnya kolaborasi dan kemitraan lintas sektor	Kerja sama dengan instansi provinsi, swasta, dan komunitas belum terbangun secara berkelanjutan.	Belum adanya mekanisme kemitraan yang terstruktur.- Komunikasi lintas sektor belum intensif.- Belum terintegrasi program lintas bidang secara sistematis.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan pelayanan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) Kabupaten Luwu Timur, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dinas masih menghadapi beberapa kendala yang bersifat struktural, sumber daya, serta koordinatif.

Permasalahan utama yang muncul meliputi belum optimalnya pelayanan bidang pariwisata, rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, belum maksimalnya pembinaan dan prestasi olahraga, serta lemahnya koordinasi internal dan kemitraan lintas sektor.

Akar permasalahan umumnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas SDM, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum terintegrasinya sistem pelayanan berbasis digital. Selain itu, sinergi antara Disparmudora dengan instansi provinsi, lembaga kepemudaan, komunitas pariwisata, dan sektor swasta juga belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya strategis berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya daerah, dan digitalisasi pelayanan publik agar kinerja Disparmudora semakin efektif, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga.

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tugas dan fungsi Disparmudora maka ditetapkan beberapa isu strategis periode 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan investasi pariwisata dan pengembangan destinasi baru yang potensial dan berkelanjutan
2. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kepariwisataan Lokal
3. Peningkatan Aksesibilitas Fisik dan Digital Antar Destinasi Wisata

4. Membangun Kolaborasi Promosi Wisata yang Terpadu dan Efektif antar Stakeholder
5. Penguatan Program Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Pemuda untuk Mencetak Pemimpin Masa Depan
6. Peningkatan prestasi olahraga
7. Infrastruktur dan pembiayaan sarpras olahraga

Tabel 2.17
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Kertas Kerja)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Ketersediaan objek wisata yang potensial	Minimnya investasi dan perhatian terhadap pengembangan potensi wisata	Ketimpangan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur	Industri, inovasi dan infrastruktur	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan daya tarik wisata	mendorong peningkatan investasi pariwisata dan pengembangan destinasi baru yang potensial dan berkelanjutan
	Lemahnya kapasitas SDM pengelola wisata lokal dan kelembagaan kepariwisataan					Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kepariwisataan Lokal

	Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas antar-destinasi (jalan, transportasi, internet)		Kehidupan sehat dan sejahtera		Peningkatan Aksesibilitas Fisik dan Digital Antar Destinasi Wisata
	Belum maksimalnya integrasi promosi antar-stakeholder (pemerintah, pelaku usaha, komunitas)				Membangun Kolaborasi Promosi Wisata yang Terpadu dan Efektif antar Stakeholder
Besarnya jumlah penduduk usia produktif	Belum optimalnya pengembangan karakter dan kepemimpinan pemuda		Pelestarian ekosistem darat	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguanan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Program Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Pemuda untuk Mencetak Pemimpin Masa Depan
	Belum optimalnya				Peningkatan prestasi olahraga

	pemberdayaan dan patrisipasi pemuda					
	Belum optimalnya dukungan wira usaha muda					Pengembangan olahraga masyarakat
						Infrastruktur dan pembiayaan sarpras olahraga
	Belum optimalnya kesejahteraan dan perlindungan pemuda					
Tingginya minat masyarakat berolahraga	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi		Kehidupan sehat dan sejahtera			
	Belum optimalnya pengembangan olahraga rekreasi dan masyarakat					
	Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga					
	Belum optimalnya kerja sama dengan Lembaga terkait.					

Isu-isu strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur mencerminkan fokus pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. Pada sektor pariwisata, prioritas diarahkan untuk mendorong peningkatan investasi dan pengembangan destinasi baru yang potensial, memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan lokal, meningkatkan aksesibilitas fisik dan digital antar destinasi wisata, serta membangun kolaborasi promosi yang terpadu dan efektif antar pemangku kepentingan. Di bidang kepemudaan, perhatian difokuskan pada penguatan program pengembangan karakter dan kepemimpinan pemuda agar mampu mencetak generasi muda yang berdaya saing, kreatif, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Sementara pada sektor olahraga, arah strategis difokuskan pada peningkatan prestasi atlet, pengembangan olahraga masyarakat, serta penyediaan dan pembiayaan infrastruktur olahraga yang memadai dan merata di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, isu-isu tersebut menjadi landasan bagi Disparmudora dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, sehat, dan berdaya saing melalui sinergi lintas sektor dan pengelolaan potensi daerah yang berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Disparmudora

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistik, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Keterkaitan tujuan penyelenggaraan bidang urusan Kepariwisataan dan urusan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dengan mengacu pada misi, visi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029, dijabarkan sebagai berikut :

- Visi** : Luwu Timur Maju dan Sejahtera
- Misi (M1)** : Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing.
- Misi (M2)** : Meningkatnya daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Tujuan Renstra Disparmudora yaitu:

“Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga serta Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif”

Adapun indikator pada tujuan tersebut adalah:

- a. Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makan, minum

Merupakan indikator komposit yang mencerminkan perkembangan pemuda dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan partisipasi.

Formulasi :

- b. Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat

Indikator ini mengukur tingkat partisipasi dan peningkatan kompetensi pemuda melalui kegiatan pelatihan atau pengembangan kapasitas.

Formulasi :

- c. Indeks Partisipasi Olahraga

Indikator ini Mengukur tingkat keterlibatan masyarakat (terutama usia produktif/pemuda) dalam aktivitas olahraga baik formal (kompetisi) maupun informal (rekreasi). Indeks ini menunjukkan budaya hidup sehat dan pembinaan olahraga di masyarakat.

Formulasi :

$$\text{Jumlah penduduk} > 10^{\text{th}} \text{ yang berolahraga} > 1x/\text{minggu (12 bulan terakhir)}$$

$$\text{Jumlah penduduk} \geq 10^{\text{th}} \times 100\%$$

3.2. Sasaran Renstra Disparmudora

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Disparmudora dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
3.26.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga												
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga (S3) Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif (S6) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga serta Meningkatnya Nilai Tambang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24		
				0,15	0,15	0,19	0,21	0,24	0,25	0,28		
				0	0	0,037	0,039	0,04	0,041	0,041		
			Menyekolahkan akuntabilitas Disparmudora	Nilai AKIP Disparmudora (Nilai)	68	68	70	70	72	72	72	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	1,24	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,5		
				64	64	74	84	94	104	104		
			Meningkatnya Daya Saing Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	14,89	15,39	15,89	16,39	16,89	17,39	17,89	
				Tingkat hunian Akomodasi (%)	15,75	15,75	15,8	15,85	15,9	16	16	

Sasaran I

Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan dan Prestasi Olahraga

Sasaran “Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan dan Prestasi Olahraga” bertujuan untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam berbagai aktivitas positif, baik melalui organisasi kepemudaan maupun kegiatan olahraga, sehingga tercipta generasi yang aktif, produktif, sehat, berdaya saing, dan berkarakter. Sasaran ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas ruang partisipasi pemuda serta meningkatkan kualitas pembinaan olahraga agar mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator yaitu :

1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
2. Peningkatan Prestasi Olahraga

Indikator Kinerja ini akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi Sasaran Kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Untuk mengukur indikator tersebut, maka formulasi yang digunakan sebagai berikut:

*Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi
kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota X 100%*

Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana pemuda terlibat secara aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, baik dalam bentuk keanggotaan, keikutsertaan dalam program, maupun keterlibatan dalam kepengurusan dan aksi sosial. Indikator ini menilai kepedulian, peran, serta kontribusi pemuda dalam proses pembangunan sosial kemasyarakatan dan menjadi dasar evaluasi terhadap keberhasilan pembinaan serta pemberdayaan pemuda di suatu wilayah.

Peningkatan Prestasi Olahraga

Untuk mengukur indikator tersebut, maka formulasi yang digunakan sebagai berikut :

“Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional”

Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan ukuran yang menggambarkan perkembangan capaian atlet dalam berbagai cabang olahraga, baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional, yang terlihat dari peningkatan jumlah atlet berprestasi, perolehan medali, serta kualitas hasil pertandingan. Indikator ini menunjukkan efektivitas pembinaan olahraga yang dilakukan pemerintah atau organisasi olahraga dan menjadi acuan dalam mengevaluasi keberhasilan program pembinaan, pengembangan talenta, dan peningkatan daya saing atlet.

Sasaran II

Meningkatnya daya saing destinasi wisata dan ekonomi kreatif

Sasaran “Meningkatnya daya saing destinasi wisata dan ekonomi kreatif” bertujuan untuk memperkuat kualitas dan daya tarik destinasi wisata serta meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif agar mampu bersaing dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Sasaran ini menekankan pengembangan produk wisata yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang produktif, adaptif terhadap perkembangan pasar, dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta kesejahteraan masyarakat.

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator yaitu :

1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan
2. Tingkat Hunian Akomodasi

Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan

Untuk mengukur Indikator ini, maka formulasi yang digunakan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } N - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$$

Indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan merupakan ukuran yang menunjukkan peningkatan atau penurunan jumlah wisatawan asing dari masing-masing negara asal dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas promosi pariwisata, daya tarik destinasi, serta tren kunjungan

wisatawan berdasarkan kebangsaan, sehingga dapat menjadi dasar perumusan strategi pemasaran pariwisata yang lebih terarah dan sesuai dengan segmentasi pasar internasional.

Tingkat Hunian Akomodasi

Untuk mengukur indikator tersebut, maka formulasi yang digunakan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$$

Indikator Tingkat Hunian Akomodasi merupakan ukuran yang menggambarkan persentase penggunaan kamar atau unit akomodasi—seperti hotel, penginapan, dan homestay—yang terpakai dibandingkan dengan jumlah ketersediaan dalam periode tertentu. Indikator ini menunjukkan tingkat kunjungan wisatawan serta performa sektor pariwisata dan jasa perhotelan, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan optimalisasi pengelolaan akomodasi.

Sasaran III

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disparmudora

Sasaran ini menggambarkan upaya peningkatan tanggung jawab, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Akuntabilitas kinerja berarti bahwa setiap perangkat daerah mampu menunjukkan hasil (outcome) yang dicapai dari penggunaan anggaran publik, serta menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara sistematis dan terukur. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen terhadap good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

Nilai AKIP adalah rangkaian Sistematik dari berbagai Aktivasi Alat dan Prosedur yang dirancang untuk tujuan Penetapan dan pengukuran Pengumpulan Data Pengklasifikasian, Pengiktisan dan Pelaporan Kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka Pertanggungjawaban dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah dengan formulasi sebagai berikut :

“Nilai Hasil Akhir dan penjumlahan Komponen-komponen Evaluasi AKIP”

Nilai AKIP Perangkat Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja karena merupakan salah satu Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan yang

dianggap selaras untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah.

3.3. Strategi Disparmudora

Strategi renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra Disparmudora. Adapun penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.4

**Penahapan Renstra Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Luwu Timur**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pendataan dan pemetaan potensi pemuda dan atlet, Pembentukan dan penguatan forum/organisasi kepemudaan tingkat kecamatan/desa dan Peningkatan sosialisasi dan pelibatan pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Peningkatan kapasitas kepemudaan melalui Pelatihan kewirausahaan pemuda(UMKM, digital), serta Pembinaan atlet muda berjenjang (sekolah, desa, kecamatan) dan Kompetisi kepemudaan dan olahraga tingkat lokal	Penguatan jejaring dan kemitraan dengan lembaga pelatihan/keolahragaan, Pendampingan wirausaha pemuda dan inkubasi usaha dan Seleksi atlet menuju PORDA/PON	Pemanfaatan digitalisasi untuk promosi dan jejaring usaha pemuda, Optimalisasi pembinaan atlet melalui PPLD/kerja sama KONI dan Partisipasi aktif pemuda dalam forum nasional	Evaluasi capaian dan replikasi model sukses ke wilayah lain, Penguatan keberlanjutan organisasi pemuda dan Penajaman strategi pembinaan atlet menuju prestasi tinggi
Bidang Pariwisata Penguatan fondasi dan identifikasi potensi wisata dan pelaku ekonomi kreatif, penyusunan roadmap pengembangan destinasi dan ekonomi kreatif, identifikasi kelembagaan, SDM dan infrastruktur dasar serta koordinasi	Penguatan kapasitas dan infrastruktur dasar seperti pelatihan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif, peningkatan infrastruktur dasar destinasi (akses, fasilitas umum), pembentukan kelembagaan atau kolaborasi (pokdarwis, komunitas ekonomi kreatif),	Akselerasi pengembangan dan Promosi destinasi dan produk ekonomi kreatif secara digital dan offline, penguatan event-event daerah (festival budaya, pameran ekonomi kreatif), peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif (kurasi, desain, kemasan) serta pengembangan kemitraan usaha dan platform pemasaran digital	Integrasi pengembangan wisata dan ekonomi kreatif dalam ekosistem ekonomi lokal, pengembangan kawasan wisata tematik dan desa wisata, inkubasi bisnis ekonomi kreatif dan pendampingan UMKM, serta kolaborasi antar	Pengembangan model wisata berbasis komunitas dan lingkungan, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam ekonomi kreatif, monitoring dan evaluasi berkelanjutan serta reformulasi kebijakan berbasis hasil dan dampak

lintas sektor dan pemangku kepentingan	pengembangan branding awal destinasi dan produk ekonomi kreatif		daerah (regional branding)	
--	---	--	----------------------------	--

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Renstra Disparmudora Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Disparmudora.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah (Kertas Kerja)

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Implementasi Grand Design Kepemudaan dan IPP (Permenpora No. 43/2019 dan No. 14/2017)	diarahkan pada pengintegrasian program sosial agar lebih adaptif dan tepat sasaran melalui pemanfaatan data terpadu. Perlindungan sosial diperluas	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Bidang Kepemudaan dan Olahraga

	Pembinaan atlet berjenjang sesuai Desain Besar Olahraga Nasional (Permenpora No. 3/2020)	dengan memperluas layanan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan, serta peningkatan kualitas pelayanan keluarga untuk mendukung ketahanan sosial dan ekonomi rumah tangga.		
2	Peningkatan kualitas pengelolaan destinasi wisata (Permenparekraf No. 10/2020)	Kebijakan diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM melalui sertifikasi produk, digitalisasi koperasi, pembentukan start-up, serta perluasan akses pasar. Pengendalian inflasi juga didukung dengan memperkuat ekosistem UMKM berbasis inovasi dan digitalisasi.	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Bidang Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur berorientasi pada sinkronisasi dengan kebijakan nasional melalui operasionalisasi NSPK di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Pada bidang

kepemudaan, implementasi Grand Design Kepemudaan dan Indeks Pembangunan Pemuda diarahkan untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas ketahanan sosial-ekonomi keluarga. Pada bidang olahraga, kebijakan difokuskan pada pembinaan atlet secara berjenjang sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional untuk mencetak atlet berprestasi dan memperkuat ekosistem keolahragaan daerah. Sementara itu, pada bidang pariwisata, arah kebijakan menitikberatkan pada peningkatan daya saing pariwisata daerah dengan memperkuat pengelolaan destinasi wisata sesuai standar nasional, mendorong inovasi dan digitalisasi usaha pariwisata, serta memperluas akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM pendukung sektor wisata.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Program dalam dokumen Renstra Disparmudora disusun sebagai instrumen strategis untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah dalam bidang kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan ke dalam bentuk langkah-langkah operasional yang terencana dan terukur. Program tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Disparmudora selama periode lima tahun. Setiap program diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan sektor pariwisata, peningkatan partisipasi dan kreativitas pemuda, serta pengembangan prestasi olahraga daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program dalam Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Disparmudora dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Perumusan program dalam Renstra Dinas Disparmudora didasarkan pada hasil analisis terhadap kondisi eksisting, tantangan, dan peluang pembangunan daerah di sektor pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan. Setiap program mencakup kegiatan yang dirancang untuk memperkuat daya saing pariwisata daerah, meningkatkan kapasitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan, serta mendorong pembinaan dan pengembangan olahraga secara berkelanjutan. Di dalamnya juga tercantum indikator kinerja program, sasaran, target capaian, serta kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan selama periode perencanaan. Selain itu, penyusunan program dilakukan dengan memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah lainnya, seperti RPJMD dan Renstra Kementerian terkait, agar tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga.

Secara keseluruhan, program dalam Renstra Disparmudora berfungsi sebagai pedoman, alat kendali, serta tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan sektor unggulan daerah yang berdaya saing. Melalui pelaksanaan program yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil, Disparmudora mampu meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat karakter dan potensi generasi muda, serta menciptakan ekosistem keolahragaan yang sehat, kompetitif, dan berprestasi. Dengan demikian,

keberadaan program dalam Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan teknokratis, tetapi juga merupakan wujud komitmen nyata Disparmudora dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada potensi lokal. Tabel berikut menyajikan gambaran umum rencana program Disparmudora untuk tahun 2025-2030 :

Tabel 4.1
Program Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					11.286.703.330,00		11.431.703.330,00		11.496.703.330,00		10.506.703.330,00		11.801.703.330,00		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.990.000.000,00		3.035.000.000,00		3.100.000.000,00		3.110.000.000,00		4.155.000.000,00		
Meningkatnya kemandirian dan kontribusi pemuda dalam pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan	Percentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Pengembangan Kepemudaan (%)	0	6,28	6,28	2.990.000.000,00	6,30	3.035.000.000,00	6,32	3.100.000.000,00	6,34	3.110.000.000,00	6,36	4.155.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHARGAAN					7.796.703.330,00		7.796.703.330,00		7.796.703.330,00		6.796.703.330,00		6.796.703.330,00		
Meningkatnya prestasi dan daya saing atlet daerah pada tingkat regional, nasional, maupun internasional	Percentase peningkatan prestasi olahraga (%)	100	85	85,5	7.796.703.330,00	86	7.796.703.330,00	86,5	7.796.703.330,00	87	6.796.703.330,00	87	6.796.703.330,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					500.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		850.000.000,00		
Meningkatnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepramukaan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan	Percentase gugus depan yang aktif (%)	95	98	99	500.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					12.683.195.710,00		12.834.228.186,00		13.330.108.938,00		13.983.642.855,00		16.653.110.384,00		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.706.294.210,00		9.065.981.611,00		9.483.452.034,00		9.961.153.008,00		10.366.996.047,00		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Disparmudora sesuai Tugas dan Fungsi	Percentase penunjang urusan disparmudora yang berjalan sesuai standar (%)	98	98	100	8.706.294.210,00	100	9.065.981.611,00	100	9.483.452.034,00	100	9.961.153.008,00	100	10.366.996.047,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.150.000.000,00		800.000.000,00		730.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Percentase jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	100	100	100	1.150.000.000,00	100	800.000.000,00	100	730.000.000,00	100	750.000.000,00	100	850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	

3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.711.449.500,00		1.797.021.975,00		1.886.871.074,00		1.981.214.726,00		2.080.275.461,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Percentase Event Pemasaran yang di Laksanakan/di ikuti (%)	100	100	100	1.711.449.500,00	100	1.797.021.975,00	100	1.886.871.074,00	100	1.981.214.726,00	100	2.080.275.461,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.115.452.000,00		1.171.224.600,00		1.229.785.830,00		1.291.275.121,00		3.355.838.876,00	
Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing	Percentase peningkatan kapasitas sdm pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif (%)	7,7	7,7	8,0	1.115.452.000,00	8,3	1.171.224.600,00	8,6	1.229.785.830,00	8,9	1.291.275.121,00	9,2	3.355.838.876,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
TOTAL KESELURUHAN					23969899040,00		24265931516,00		24826812268,00		24490346185,00		28454813714,00	

Tabel ini menyajikan gambaran umum rencana Disparmudora periode tahun 2025-2030, yang mencakup tujuh program yaitu :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (2.19.02)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta kontribusi pemuda dalam pembangunan ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan dan kegiatan kepemudaan lainnya. Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kemandirian dan kontribusi pemuda dalam pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan. Keberhasilan program diukur melalui indikator persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan pengembangan kepemudaan.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (2.19.03)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan prestasi dan daya saing atlet daerah pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Outcome yang ingin dicapai adalah meningkatnya prestasi dan daya saing atlet daerah pada tingkat regional, nasional maupun internasional. Indikator keberhasilan program ini adalah persentase peningkatan prestasi olahraga.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (2.19.04)

Program ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat ketertiban, disiplin, serta peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepramukaan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya ketertiban dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepramukaan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan. Indikator pencapaian program ini adalah persentase gugus depan yang aktif.

4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata daerah agar mampu menarik lebih banyak wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata, dengan indikator persentase jumlah kunjungan wisatawan.

5. Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)

Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas promosi pariwisata daerah melalui berbagai kegiatan pemasaran dan partisipasi dalam event kepariwisataan. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya jangkauan

pemasaran pariwisata, dengan indikator persentase event pemasaran yang dilaksanakan/diikuti.

6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing pelaku pariwisata serta ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing, dengan indikator persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

7. Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (2.19.01)

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan dispermudora sesuai dengan tugas dan fungsi. Indikator kinerjanya adalah persentase penunjang urusan dispermudora yang berjalan sesuai standar.

4.2. Uraian Kegiatan

Setelah program strategis ditetapkan, tahap berikutnya adalah merumuskan kegiatan yang lebih operasional dan terarah. Setiap kegiatan berperan sebagai langkah taktis untuk mencapai outcome program dan memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis serta pelaksanaan di lapangan sesuai sasaran Renstra Dispermudora.

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (2.19.02)

Fokus pada peningkatan kualitas, kemandirian, dan daya saing pemuda melalui pelatihan, pembinaan, serta penguatan peran organisasi kepemudaan.

a) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota (2.19.02.2.01) dengan output terselenggaranya pelatihan kader pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian sosial, semangat kesukarelawanan dan jiwa kepeloporan pemuda. Indikator persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, sukarelawan dan kepeloporan pemuda

- b) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (2.19.02.2.02) dengan output terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penguatan kapasitas organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan yang melibatkan pemuda. Indikator persentase tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemsyarakatan.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (2.19.03)

Berfokus pada pembinaan prestasi atlet, peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga, serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (2.19.03.02.01) dengan output terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di jenjang pendidikan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota dengan peningkatan jumlah peserta, pasilitasi, serta prestasi olahraga pelajar. Indikator persentase meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota.
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (2.19.03.2.02) dengan output terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga ditingkat daerah kabupaten/kota secara teratur, terukur, berkualitas, dan partisipatif. Indikator persentase peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat daerah kab/kota.
- c) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat daerah Provinsi (2.19.03.2.03) dengan output terwujudnya penyelenggaraan event olahraga berprestasi di tingkat daerah yang terstruktur, berkualitas, dan mendorong peningkatan prestasi atlet. Indikator persentase penyelenggaraan event olahraga berprestasi di tingkat daerah.
- d) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (2.19.03.2.04) dengan output terwujudnya peningkatan kapasita dan kinerja organisasi olahraga melalui pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. Indikator persentase peningkatan pembinaan organisasi olahraga.
- e) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi (2.19.03.2.05) dengan output terwujudnya peningkatan pelaksanaan olahraga rekreasi yang partisipatif, berkelanjutan dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Indikator persentase peningkatan olahraga rekreasi yang dilaksanakan.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (2.19.04)

Menitikberatkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan dan penguatan kelembagaan pramuka.

- a) Pembinaan dan Penghasilan Organisasi Kepramukaan (2.19.04.2.01) dengan output terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan secara berkelanjutan. Indikator persentase pembinaan kepramukaan di luwu timur.

4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)

Difokuskan pada pengembangan dan penataan destinasi wisata agar lebih menarik, nyaman, dan berdaya saing tinggi bagi wisatawan

- a) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.02) dengan output terkelolanya kawasan strategis pariwisata. Indikator persentase kawasan strategis pariwisata yang dikelolah.
- b) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03) dengan output terkelolanya destinasi pariwisata. Indikator persentase destinasi pariwisata yang dikelola.
- c) Penetapan Tanda daftar usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04) dengan output terfasilitasinya penetapan tanda daftar usaha pariwisata. Indikator persentase penetapan tanda daftar pariwisata yang terfasilitasi.

5. Program Pemasaran Pariwisata (3.26.03)

Berfokus pada promosi potensi wisata daerah melalui berbagai media dan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

- a) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.03.2.01) dengan output terlaksananya kegiatan promosi destinasi pariwisata pada event nasional dan internasional. Indikator persentase pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata.

6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)

Fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

- a) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar (3.26.05.2.01) dengan output terselenggaranya

pelatihan dasar/bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dengan output terselenggaranya pelatihan dasar bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang di sertifikasi.

- b) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.02) dengan output meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pelaku ekonomi kreatif. Indikator persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi.

7. Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (2.19.01)

Difokuskan pada dukungan administratif, keuangan, perencanaan, serta pengelolaan sumber daya aparatur agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.19.01.2.01) (pembuatan rencana kerja, anggaran, serta pengukuran keberhasilan kinerja setiap PD), dengan output tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%).
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2.19.01.2.02) (pengurusan keuangan internal setiap PD, seperti pembayaran gaji pegawai dan tagihan), dengan output tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Pengelolaan Keuangan Disparmudora. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Realisasi Anggaran (%).
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.19.01.2.03) (pengelolaan dan pencatatan aset atau barang yang digunakan oleh masing-masing dinas), dengan output Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas PNS dan Peningkatan Administrasi Aset yang Tercatat dengan baik. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Aset Teradministrasi (%).
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.19.01.2.05) (pengurusan semua hal terkait data pegawai, seperti kenaikan pangkat, pensiun, dan pelatihan), dengan output Peningkatan Kualitas Data dan Pengelolaan Kepegawaian. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%).
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.19.01.2.06) (penanganan urusan operasional kantor sehari-hari, seperti surat-menyurat, logistik, dan rapat), dengan output Peningkatan Kualitas layanan Administrasi, Pengelolaan Dokumen yang Tertib, Pengelolaan Arsip Dinamis yang baik serta Dokumen terhadap Sistem Pemerintah berbasis Elektronik. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%).

- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.19.01.2.07) (proses pembelian aset dan barang baru untuk mendukung operasional pemerintah daerah), dengan output Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik melalui Pemenuhan Kebutuhan BMD. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang Dengan Rencana Kebutuhan (%).
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.19.01.2.08) (pemastian layanan pendukung seperti listrik, air, internet, dan kurir kantor berjalan lancar), dengan output tersedianya Layanan atau jasa yang mendukung Melaksanakan Tugas Perangkat Daerah. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan (%).
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.19.01.2.09) (perawatan dan perbaikan rutin untuk semua aset daerah seperti gedung dan kendaraan), dengan output Peningkatan Kondisi dan Umur Pakai BMD yang diperlukan. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Barang Dipelihara Secara Berkala (%).

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
						(07)	
3.26.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga							
- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga (S3) - Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif (S6) - Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga serta Meningkatnya Nilai Tambang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)		
					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
					Indeks Partisipasi Olahraga (Persentase)		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Dispermudora sesuai Tugas dan Fungsi		Persentase penunjang urusan dispermudora berjalan sesuai standar (%)	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (%)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (%)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	

			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas PNS dan Peningkatan Administrasi Aset yang Tercatat dengan Baik	Persentase asset teradministrasi	3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.26.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
			Peningkatan Kualitas Data dan Pengelolaan Kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.26.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.26.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.26.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
			Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi, Pengelolaan Dokumen yang Tertib, Pengelolaan Arsip Dinamis yang Baik, Serta Dukungan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan administrasi tepat waktu	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.26.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.26.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik melalui Pemenuhan Kebutuhan BMD	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Tersedianya Layanan atau Jasa yang Mendukung Melaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Peningkatan Kondisi dan Umur Pakai BMD yang dipelihara	Persentase barang dipelihara secara berkala	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.26.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan dan Prestasi Olahraga		Tingakt partisipasi pemuda dalam oraganisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)		
			Peningkatan prestasi olahraga (Medali)		

		Meningkatnya kemandirian dan kontribusi pemuda dalam pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan	Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Pengembangan Kepemudaan (%)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
		Terselenggaranya pelatihan kader pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian sosial, semangat kesukarelawanan, dan jiwa kepeloporan pemuda	Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian sosial, sukarelawan dan kepeloporan pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)		2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)		2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)		2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	

			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			Presentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penuguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya prestasi dan daya saing atlet daerah pada tingkat regional, nasional, maupun internasional	Persentase tingkat prestasi olahraga (%) (Persen) (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	

			<p>Terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di jenjang pendidikan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota dengan peningkatan jumlah peserta, fasilitas, serta prestasi olahraga pelajar</p>	<p>Presentase Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota</p>	<p>2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>	
			<p>Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)</p>	<p>2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota</p>		
			<p>Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat daerah kabupaten/kota secara teratur, berkualitas, dan partisipatif</p>	<p>Presentase Peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat Daerah kab/kota</p>	<p>2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	
			<p>Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)</p>	<p>2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</p>		
			<p>Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)</p>	<p>2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga</p>		

			Terwujudnya penyelenggaraan event olahraga berprestasi di tingkat daerah yang terstruktur, berkualitas, dan mendorong peningkatan prestasi atlet	Persentase penyelenggaraan event olahraga berprestasi di tingkat daerah	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota		
			Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi olahraga melalui pembinaan sistematis yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan Pembinaan Organisasi Olahraga	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		
			Terwujudnya peningkatan pelaksanaan olahraga rekreasi yang partisipatif, berkelanjutan, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat	Persentase Peningkatan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		

			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
		Meningkatnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepramukaan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan	persentase gugus depan yang aktif (persen) (%)	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan secara berkelanjutan	Persentase pembinaan kepramukaan di Luwu Timur (%)	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
		Meningkatnya Daya Saing Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	2.19.04.2.01.0008 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	
			Percentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)		
			Tingkat hunian Akomodasi (%)		
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Percentase Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	

			Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata	Persentase kawasan strategis pariwisata yang dikelola (%)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Terkelolanya Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola (%)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Terfasilitasinya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Persentase penetapan tanda daftar pariwisata yang terfasilitasi (%)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata			Persentase Event Pemasaran yang di Laksanakan/di ikuti (%)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

			Terlaksananya Kegiatan Promosi Destinasi Pariwisata pada Event Nasional dan Internasional	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pariwisata	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
	Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing		Persentase peningkatan kapasitas sdm pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif (%)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		

			Terseleggaranya Pelatihan Dasar bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)		3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)		3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)		3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku Ekonomi Kreatif.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi (%)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)		3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)		3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	

4.3. Uraian Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029. Setiap subkegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah serta memperkuat keterkaitan antara sasaran strategis dan pelaksanaannya di tingkat operasional.

Rincian subkegiatan yang disajikan pada tabel berikut memuat informasi mengenai program, outcome, indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif pendanaan. Penjabaran ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga.p

a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota (2.19.02.2.01)

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (2.19.02.2.01.0010). Indikator jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dikabupaten/kota (Dokumen).
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula tingkat Kabupaten/Kota (2.19.02.2.01.0011). Indikator wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda (orang).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota (2.19.02.2.01.0013). Indikator jumlah kabupaten/kota dengan kepemimpinan dan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda (kegiatan)
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelapor tingkat Kabupaten/Kota (2.19.02.2.01.0015). Indikator Jumlah Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda (orang).

- 5) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota (2.19.02.2.01.0016). Indikator jumlah prasarana kepemudaan ditingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit).

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (2.19.02.2.02)

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat kabupaten/kota (2.19.02.2.02.0003). Indikator jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapsitasnya (Organisasi).
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda tingkat Kabupaten/Kota (2.19.02.2.02.0004). Indikator jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam penhembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang).

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (2.19.03.2.01)

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga ditingkat Kabupaten/Kota (2.19.03.2.01.0006). Indikator jumlah sarana dan prasarana olahraga ditingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit).

d. Kegiatan Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (2.19.03.2.02)

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event tingkat Kabupaten/Kota (2.19.03.2.02.0004). Indikator jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota (Kegiatan).
- 2) Sub Kegiatan Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (2.10.03.2.02.0006). Indikator jumlah peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota (Orang).

e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat daerah Provinsi (2.19.03.2.03)

- 1) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu dikabupaten/Kota (2.19.03.2.03.0010). Indikator jumlah dokumen penyediaan data keolahragaan terpadu dikabupaten/kota (Dokumen).

f. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (2.19.03.2.04)

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan dikabupaten/kota (2.19.03.2.04.0005). Indikator persentase pengelolaan organisasi keolahragaan dikabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen).
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait (2.19.03.2.04.0006). Indikator jumlah dokumen hasil peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota (Dokumen).

g. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi (2.19.03.2.05)

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (2.19.03.2.05.0006). Indikator jumlah laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi (Laporan0).
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Olahragaisata, Tantangan dan Petualangan (2.19.03.2.05.0007). Indikator jumlah dokumen lembaga hasil penyelenggaraan olahraga wisata, tantangan dan petualangan (Laporan).
- 3) Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat (2.19.03.2.05.00080. Indikator jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat (Dokumen).

h. Kegiatan Pembinaan dan Penghasilan Organisasi Kepramukaan (2.19.04.2.01)

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapsitas Organisasi Kepramukaan tingkat Daerah (2.19.04.2.01.0002). Indikator jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya (Organisasi)
- 2) Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan (2.19.04.2.01.0008). Indikator jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan (Organisasi).

i. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata yang di Kelolah (3.26.02.2.02)

- 1) Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.02.0001). Indikator tersedianya dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota (Dokumen).

- 2) Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.02.0007). Indikator jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota (Lokasi).

j. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03)

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.02.2.03.0004). Indikator jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara (Unit).

k. Kegiatan Penetapan Tanda daftar usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (3.26.02.2.04)

- 1) Sub Kegiatan Sertifikasi Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (tanpa verifikasi) (3.26.02.2.04.0010). Indikator jumlah usaha yang bersertifikasi melalui lembaga OSS sebelum beroperasi (Usaha).

I. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.03.2.01)

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.0003). Indikator jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri (Dokumen).
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.0004). Indikator jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri (Dokumen).
- 3) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (3.26.03.2.01.0005). Indikator jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata (Dokumen).
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (3.26.03.2.01.0006). Indikator jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri (Kegiatan).
- 5) Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri (3.26.03.2.01.0007). Indikator jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri (Promosi).

m. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar (3.26.05.2.01)

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.01.0006). Indikator jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif (Orang).
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (3.26.05.2.01.0009). Indikator jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata (Orang).
- 3) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05.01.0011). Indikator jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Laporan).

n. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.02)

- 1) Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.02.0001). Indikator jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif (Orang).
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif (3.26.05.2.02.0007). Indikator jumlah orang yang difasilitasi sertifikasi kompetensi subsektor ekonomi kreatif (Orang).

o. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.19.01.2.01)

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2.19.01.2.01.0001) (proses pembuatan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) BKAD). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen).
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2.19.01.2.01.0002) (tahap penyusunan rincian rencana kerja dan anggaran untuk setiap dinas). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (2.19.01.2.01.0004) (pembuatan dokumen acuan untuk melaksanakan anggaran yang telah disetujui). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dokumen).

4) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.19.01.2.01.0007) (pengukuran dan pelaporan capaian kinerja setiap dinas secara berkala). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan).

p. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2.19.01.2.02)

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2.19.01.2.02.0001) (proses administrasi untuk memastikan semua pegawai negeri menerima gaji tepat waktu). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan).
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (2.19.01.2.02.0005) (proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap dinas di akhir tahun). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (2.19.01.2.02.0007) (pembuatan laporan keuangan rutin BKAD secara berkala sepanjang tahun). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan).

q. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.19.01.2.03)

- 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (2.19.01.2.03.0006) (pencatatan dan pelaporan semua aset atau barang yang digunakan oleh dinas). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan).

r. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.19.01.2.05)

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (2.19.01.2.05.0002) (kegiatan membeli seragam dinas baru untuk para pegawai sesuai aturan). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket).
- 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (2.19.01.2.05.0003) (pengelolaan data dan dokumen kepegawaian untuk setiap pegawai di dinas). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen).

- 3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (2.19.01.2.05.0011) (pelatihan bagi pegawai untuk memahami dan menerapkan aturan-aturan terbaru). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang).

s. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.19.01.2.06)

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.19.01.2.06.0001) (pembelian kebutuhan listrik kantor seperti lampu, kabel, dan saklar). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.19.01.2.06.0002) (untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor). Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2.19.01.2.06.0004) (pembelian perlengkapan kantor sehari-hari seperti alat tulis, kertas, dan tinta). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (2.19.01.2.06.0005) (pembiayaan untuk mencetak dokumen, spanduk, atau fotokopi untuk keperluan dinas). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket).
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2.19.01.2.06.0006) (pembelian koran, majalah, atau buku peraturan untuk referensi kantor). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen).
- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (2.19.01.2.06.0008) (pengurusan jamuan dan akomodasi untuk tamu yang berkunjung ke dinas). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan).
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2.19.01.2.06.0009) (pembiayaan untuk pelaksanaan rapat-rapat internal maupun eksternal dinas). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan).

t. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.19.01.2.08)

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2.19.01.2.08.0001) (pembayaran biaya pengiriman surat atau dokumen dinas melalui pos atau kurir). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.19.01.2.08.0002) (pembayaran tagihan bulanan kantor seperti telepon, internet, air, dan listrik). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.19.01.2.08.0004) (pembayaran gaji untuk tenaga pendukung kantor seperti petugas kebersihan atau keamanan). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan).

u. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.19.01.2.09)

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2.19.01.2.09.0001) (pembentukan servis rutin, perbaikan, dan pajak tahunan untuk kendaraan dinas). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit).
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.19.01.2.09.0006) (pembentukan untuk servis atau perbaikan peralatan kantor seperti komputer dan AC). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit).
- 6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2.19.01.2.09.0009) (pembentukan untuk perbaikan atau renovasi kecil pada gedung kantor). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi (Unit).

Rincian subkegiatan yang disajikan pada tabel berikut memuat informasi mengenai program, outcome, indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif pendanaan. Penjabaran ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				11.286.703.330		11.431.703.330		11.496.703.330		10.506.703.330		11.801.703.330				
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				2.990.000.000		3.035.000.000		3.100.000.000		3.110.000.000		4.155.000.000				
Meningkatnya kemandirian dan kontribusi pemuda dalam pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan	Percentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Pengembangan Kepemudaan (%)	0	6,28	2.990.000.000	6,3	3.035.000.000	6,32	3.100.000.000	6,34	3.110.000.000	6,36	4.155.000.000	3.26.2.19.0.00.01.000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga			
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				2.374.820.000		2.182.561.000		2.308.689.050		2.178.123.503		3.180.779.679				
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				169.521.985		169.521.985		169.521.985		419.521.985		604.186.250				

Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	0	1	169.521.985	1	169.521.985	1	169.521.985	1	419.521.985	1	604.186.250	
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				283.225.500		317.757.000		358.622.865		449.554.193		472.029.698	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	0	128	283.225.500	128	317.757.000	128	358.622.865	128	449.554.193	128	472.029.698	
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				102.935.500		106.023.565		109.204.273		112.478.300		311.770.402	
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	30	1	102.935.500	1	106.023.565	1	109.204.273	1	112.478.300	1	311.770.402	
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				111.989.000		117.588.450		123.467.872		234.899.025		336.123.329	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	3	6	111.989.000	6	117.588.450	6	123.467.872	6	234.899.025	6	336.123.329	
2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota				1.707.148.015		1.471.670.000		1.547.872.055		961.670.000		1.456.670.000	

Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	6	9	1.707.148.015	9	1.471.670.000	9	1.547.872.055	9	961.670.000	9	1.456.670.000	
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan			615.180.000		852.439.000		791.310.950		931.876.497		974.220.321	
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				445.180.000		677.439.000		611.310.950		746.876.497		784.220.321	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	6	35	445.180.000	35	677.439.000	35	611.310.950	35	746.876.497	35	784.220.321	
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				170.000.000		175.000.000		180.000.000		185.000.000		190.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	0	3	170.000.000	3	175.000.000	3	180.000.000	3	185.000.000	3	190.000.000	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				7.796.703.330		7.796.703.330		7.796.703.330		6.796.703.330		6.796.703.330	
Meningkatnya prestasi dan daya saing atlet daerah pada tingkat regional, nasional, maupun internasional	Persentase tingkat prestasi olahraga (%) (Persen) (%)	100	85,5	7.796.703.330	86	7.796.703.330	86,5	7.796.703.330	87	6.796.703.330	87	6.796.703.330	3.26.2.19.0.00.01.000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				6.337.500.000		6.337.500.000		5.837.500.000		5.117.500.000		5.117.500.000	

Terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di jenjang pendidikan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota dengan peningkatan jumlah peserta, fasilitas, serta prestasi olahraga pelajar	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5	5	6.337.500.000	5	6.337.500.000	5	5.837.500.000	5	5.117.500.000	5	5.117.500.000	
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				6.337.500.000		6.337.500.000		5.837.500.000		5.117.500.000		5.117.500.000	
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5	5	6.337.500.000	5	6.337.500.000	5	5.837.500.000	5	5.117.500.000	5	5.117.500.000	
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				746.703.330		776.703.330		1.196.703.330		916.703.330		916.703.330	
Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat daerah kabupaten/kota secara teratur, berkualitas, dan partisipatif		2	4	746.703.330	3	776.703.330	3	1.196.703.330	3	916.703.330	3	916.703.330	
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				500.000.000		500.000.000		796.703.330		500.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2	4	500.000.000	3	500.000.000	3	796.703.330	3	500.000.000	3	500.000.000	
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				246.703.330		276.703.330		400.000.000		416.703.330		416.703.330	
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	30	30	246.703.330	30	276.703.330	30	400.000.000	30	416.703.330	30	416.703.330	

2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				12.500.000		13.125.000		13.781.250		13.781.250		13.781.250		
Terwujudnya penyelenggaraan event olahraga berprestasi di tingkat daerah yang terstruktur, berkualitas, dan mendorong peningkatan prestasi atlet	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	12.500.000	1	13.125.000	1	13.781.250	1	13.781.250	1	13.781.250		
2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				12.500.000		13.125.000		13.781.250		13.781.250		13.781.250		
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	12.500.000	1	13.125.000	1	13.781.250	1	13.781.250	1	13.781.250		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				500.000.000		400.000.000		479.343.750		479.343.750		479.343.750		
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi olahraga melalui pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan		2	2	500.000.000	2	400.000.000	2	479.343.750	2	479.343.750	2	479.343.750		
2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				400.000.000		300.000.000		379.343.750		379.343.750		379.343.750		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	400.000.000	2	300.000.000	2	379.343.750	2	379.343.750	2	379.343.750		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				200.000.000		269.375.000		269.375.000		269.375.000		269.375.000		
Terwujudnya peningkatan pelaksanaan olahraga rekreasi yang partisipatif, berkelanjutan, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat		1	1	200.000.000	1	269.375.000	1	269.375.000	1	269.375.000	1	269.375.000		

2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	95	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				0		119.375.000		119.375.000		119.375.000		119.375.000		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)			0	1	119.375.000	1	119.375.000	1	119.375.000	1	119.375.000		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		850.000.000		
Meningkatnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepramukaan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan	persentase gugus depan yang aktif (persen) (%)	95	99	500.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	850.000.000	3.26.2.19.0.00.01.000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		850.000.000		
Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan secara berkelanjutan			1	500.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	850.000.000		
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
2.19.04.2.01.0008 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		350.000.000		

Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)		1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	350.000.000		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				12.683.195.710		12.834.228.186		13.330.108.938		13.983.642.855		16.653.110.384		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.706.294.210		9.065.981.611		9.483.452.034		9.961.153.008		10.366.996.047		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	98	100	8.706.294.210	100	9.065.981.611	100	9.483.452.034	100	9.961.153.008	100	10.366.996.047	3.26.2.19.0.00.01.000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.894.300		121.986.400		123.739.503		124.977.224		126.168.445		
Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi		2	2	120.894.300	2	121.986.400	2	123.739.503	2	124.977.224	2	126.168.445		
3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				58.592.950		59.178.880		60.362.457		60.966.082		61.575.742		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	58.592.950	2	59.178.880	2	60.362.457	2	60.966.082	2	61.575.742		
3.26.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.829.350		5.829.350		5.887.644		6.005.396		6.065.450		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.829.350	2	5.829.350	2	5.887.644	2	6.005.396	2	6.065.450		
3.26.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.855.000		5.855.000		5.855.000		5.855.000		5.855.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.855.000	2	5.855.000		5.855.000	2	5.855.000	2	5.855.000		
3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.617.000		51.123.170		51.634.402		52.150.746		52.672.253		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	50.617.000	10	51.123.170	10	51.634.402	10	52.150.746	10	52.672.253		

3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.531.373.110		7.554.474.316		8.246.230.581		8.607.574.660		9.139.485.945	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		24	63	7.531.373.110	63	7.554.474.316	63	8.246.230.581	63	8.607.574.660	63	9.139.485.945	
3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.462.024.110		7.485.125.316		8.176.881.581		8.538.225.660		9.070.136.945	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	63	7.462.024.110	63	7.485.125.316	63	8.176.881.581	63	8.538.225.660	63	9.070.136.945	
3.26.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.999.000		2.999.000		2.999.000		2.999.000		2.999.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.999.000	1	2.999.000	1	2.999.000	1	2.999.000	1	2.999.000	
3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				66.350.000		66.350.000		66.350.000		66.350.000		66.350.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	66.350.000	18	66.350.000	18	66.350.000	18	66.350.000	18	66.350.000	
3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.890.000		21.516.700		22.162.201		22.827.067		23.511.879	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas PNS dan Peningkatan Administrasi Aset yang Tercatat dengan Baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	20.890.000	1	21.516.700	1	22.162.201	1	22.827.067	1	23.511.879	
3.26.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.890.000		21.516.700		22.162.201		22.827.067		23.511.879	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	20.890.000	1	21.516.700	1	22.162.201	1	22.827.067	1	23.511.879	
3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				182.879.000		149.482.870		153.967.356		198.836.376		163.343.968	

Peningkatan Kualitas Data dan Pengelolaan Kepegawaian			23	182.879.000		149.482.870		153.967.356	23	198.836.376		163.343.968	
3.26.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				37.750.000		0		0		40.250.000		0	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		23	37.750.000		0		0	23	40.250.000		0	
3.26.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				95.713.000		98.584.390		101.541.922		104.588.179		107.725.825	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	95.713.000	12	98.584.390	12	101.541.922	12	104.588.179	12	107.725.825	
3.26.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				49.416.000		50.898.480		52.425.434		53.998.197		55.618.143	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	10	49.416.000	10	50.898.480	10	52.425.434	10	53.998.197	10	55.618.143	
3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				410.997.800		421.753.526		433.026.660		444.830.777		444.185.700	
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi, Pengelolaan Dokumen yang Tertib, Pengelolaan Arsip Dinamis yang Baik, Serta Dukungan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		12	12	410.997.800	12	421.753.526	12	433.026.660	12	444.830.777	12	444.185.700	
3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.150.000		4.274.500		4.402.735		4.534.817		4.670.862	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	4.150.000	12	4.274.500	12	4.402.735	12	4.534.817	12	4.670.862	
3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		20.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	33.000.000	2	33.000.000	2	33.000.000	2	33.000.000	2	20.000.000	
3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.265.000		14.692.950		15.133.739		15.587.751		16.055.383	

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	14.265.000	12	14.692.950	12	15.133.739	12	15.587.751	12	16.055.383	
3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.473.600		19.473.600		19.668.336		20.061.703		20.663.554	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	19.473.600	3	19.473.600	3	19.668.336	3	20.061.703	3	20.663.554	
3.26.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.490.000		7.714.700		7.946.141		8.184.525		8.430.061	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	7.490.000	12	7.714.700	12	7.946.141	12	8.184.525	12	8.430.061	
3.26.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.430.000		25.162.900		25.917.787		26.695.321		27.496.180	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	24.430.000	4	25.162.900	4	25.917.787	4	26.695.321	4	27.496.180	
3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				308.189.200		317.434.876		326.957.922		336.766.660		346.869.660	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	308.189.200	4	317.434.876	4	326.957.922	4	336.766.660	4	346.869.660	
3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		350.000.000		50.000.000		100.000.000		0	
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik melalui Pemenuhan Kebutuhan BMD				0	1	350.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000		0	
3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		150.000.000		0		0		0	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0	2	150.000.000		0		0		0	
3.26.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		200.000.000		50.000.000		100.000.000		0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0	1	200.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000		0	

3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				367.800.000		373.164.000		378.688.920		384.379.588		390.240.975	
Tersedianya Layanan atau Jasa yang Mendukung Melaksanaan Tugas Perangkat Daerah		12	12	367.800.000	12	373.164.000	12	378.688.920	12	384.379.588	12	390.240.975	
3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.090.000		3.182.700		3.278.181		3.376.526	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	3.000.000	4	3.090.000	4	3.182.700	4	3.278.181	4	3.376.526	
3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.800.000		181.074.000		186.506.220		192.101.407		197.864.449	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	175.800.000	12	181.074.000	12	186.506.220	12	192.101.407	12	197.864.449	
3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				189.000.000		189.000.000		189.000.000		189.000.000		189.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	189.000.000	12	189.000.000	12	189.000.000	12	189.000.000	12	189.000.000	
3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				71.460.000		73.603.799		75.636.813		77.727.316		80.059.135	
Peningkatan Kondisi dan Umur Pakai BMD yang dipelihara		30	30	71.460.000	30	73.603.799	30	75.636.813	30	77.727.316	30	80.059.135	
3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.250.000		43.517.500		44.823.025		46.167.716		47.552.747	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	17	42.250.000	17	43.517.500	17	44.823.025	17	46.167.716	17	47.552.747	
3.26.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.210.000		12.576.300		12.953.589		13.342.197		13.742.463	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	12.210.000	30	12.576.300	30	12.953.589	30	13.342.197	30	13.742.463	

3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				17.000.000		17.509.999		17.860.199		18.217.403		18.763.925		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	17.000.000	1	17.509.999	1	17.860.199	1	18.217.403	1	18.763.925		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.150.000.000		800.000.000		730.000.000		750.000.000		850.000.000		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Percentase Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	100	100	1.150.000.000	100	800.000.000	100	730.000.000	100	750.000.000	100	850.000.000	3.26.2.19.0.00.01.000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				640.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		440.000.000		
Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata		90	1	640.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	440.000.000		
3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				390.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	390.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				250.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		240.000.000		
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	1	7	250.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	240.000.000		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				500.000.000		390.000.000		320.000.000		340.000.000		400.000.000		
Terkelolanya Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	7	9	500.000.000	10	390.000.000	11	320.000.000	12	340.000.000	13	400.000.000		

3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				500.000.000		390.000.000		320.000.000		340.000.000		400.000.000		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	7	9	500.000.000	10	390.000.000	11	320.000.000	12	340.000.000	13	400.000.000		
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terfasilitasinya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	0	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000		
3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	0	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1.711.449.500		1.797.021.975		1.886.871.074		1.981.214.726		2.080.275.461		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Percentase Event Pemasaran yang di Laksanakan/di Ikuti (%)	100	100	1.711.449.500	100	1.797.021.975	100	1.886.871.074	100	1.981.214.726	100	2.080.275.461	3.26.2.19.00.01.000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1.711.449.500		1.797.021.975		1.886.871.074		1.981.214.726		2.080.275.461		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Destinasi Pariwisata pada Event Nasional dan Internasional		1	2	1.711.449.500	2	1.797.021.975	2	1.886.871.074	2	1.981.214.726	2	2.080.275.461		
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				14.990.000		15.739.500		16.524.475		17.350.798		18.218.337		

Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1	14.990.000	1	15.739.500	1	16.524.475	1	17.350.798	1	18.218.337	
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				15.476.000		16.249.800		17.062.290		17.915.404		18.811.174	
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	2	15.476.000	2	16.249.800	2	17.062.290	2	17.915.404	2	18.811.174	
3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)			0		0		0		0		0	
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				319.754.000		335.741.700		352.528.785		370.155.224		388.662.985	
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	4	5	319.754.000	6	335.741.700	7	352.528.785	8	370.155.224	9	388.662.985	
3.26.03.2.01.0007 - Penguanan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1.361.229.500		1.429.290.975		1.500.755.524		1.575.793.300		1.654.582.965	
Terlaksananya Penguanan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguanan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	2	3	1.361.229.500	4	1.429.290.975	5	1.500.755.524	6	1.575.793.300	7	1.654.582.965	
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				1.115.452.000		1.171.224.600		1.229.785.830		1.291.275.121		3.355.838.876	
Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing	Persentase peningkatan kapasitas sdm pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif (%)	7,7	8	1.115.452.000	8,3	1.171.224.600	8,6	1.229.785.830	8,9	1.291.275.121	9,2	3.355.838.876	3.26.2.19.0.00.01.000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				1.045.752.000		1.099.039.600		1.154.991.580		1.213.741.159		3.275.428.216	
Terselenggaranya Pelatihan Dasar bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		70	30	1.045.752.000	30	1.099.039.600	30	1.154.991.580	30	1.213.741.159	30	3.275.428.216	
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	
3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				995.772.000		1.048.560.600		1.103.988.630		1.162.188.062		3.223.297.465	
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	90	300	995.772.000	300	1.048.560.600	300	1.103.988.630	300	1.162.188.062	300	3.223.297.465	
3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				9.980.000		10.479.000		11.002.950		11.553.097		12.130.751	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1	9.980.000	1	10.479.000	1	11.002.950	1	11.553.097	1	12.130.751	
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				69.700.000		72.185.000		74.794.250		77.533.962		80.410.660	
Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku Ekonomi Kreatif.		0	5	69.700.000	5	72.185.000	5	74.794.250	5	77.533.962	5	80.410.660	
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	0	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	

3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				49.700.000		52.185.000		54.794.250		57.533.962		60.410.660		
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	25	6	49.700.000	7	52.185.000	8	54.794.250	9	57.533.962	10	60.410.660		

Tabel 4.4
Daftar Sub kegiatan pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.26.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga				
1.	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kemandirian dan kontribusi pemuda dalam pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda 2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat 2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat 2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan	
2.	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya prestasi dan daya saing atlet daerah pada tingkat regional, nasional, maupun internasional	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di Kabupaten/Kota 2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejurnas Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
3.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	
4.	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Eletronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar	
5.	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	

		3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
--	--	---	--

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah hasil atau capaian yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik urusan wajib maupun pilihan, serta dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kinerja ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta pencapaian tujuan Pembangunan daerah.

Tabel 4.5

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur 2025-2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.26.2.19.00.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga									
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68	68	70	70	72	72	72	
3.	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	64	64	74	84	94	104	104	
4.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,24	1,5	1,75	2	2,5	2,5	2,5	
5.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	14,89	15,39	15,89	16,39	16,89	17,39	17,89	
6.	Tingkat hunian Akomodasi	%	15,75	15,75	15,8	15,85	15,9	16	16	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.	Peningkatan prestasi olahraga		Medali	64	64	74	84	94	104	104	
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam oraganisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		%	1,24	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,5	
4.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		% Nilai	43,47	44	44,5	45	45,5	46	46	
5.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
6.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota		%	1,98	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,2	
7.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		%	14,89	15,39	15,89	16,39	16,89	17,39	17,89	
8.	Tingkat hunian Akomodasi		%	15,75	15,75	15,8	15,85	15,9	16	16	
9.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		%	0,164	0,166	0,167	0,169	0,17	0,172	0,1735	

BAB V **PENUTUP**

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Disparmudora Tahun 2025–2030 merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis isu strategis, dan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah serta nasional, seperti RPJMD Kabupaten/Kota, RPJPD, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk mendukung pencapaian tersebut, telah disusun indikator kinerja utama (IKU) beserta target tahunan dan strategi pencapaiannya secara terukur. Program dan kegiatan yang dirancang mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil (outcome-based planning).

Pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran Disparmudora, serta dukungan sinergis dari pemangku kepentingan lintas sektor seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, KONI, KNPI, pelaku usaha pariwisata, komunitas pemuda, dan masyarakat umum.

Dengan implementasi Renstra ini secara konsisten, diharapkan akan terwujud pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda, serta kemajuan olahraga yang mampu membawa nama daerah ke tingkat nasional bahkan internasional.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Disparmudora Tahun 2025–2030 harus senantiasa terintegrasi dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja (PK) tiap pejabat. Selain itu, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, serta diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tiap tahun. Keselarasan ini penting untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran.

Pelaksanaan Renstra ini dilakukan dengan pendekatan berbasis hasil dan berorientasi pada kinerja. Artinya, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya dinilai dari jumlah kegiatan yang dilakukan (output), tetapi dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat (outcome). Setiap input yang digunakan harus terukur dan diarahkan untuk mencapai target kinerja yang jelas dan berdampak. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Dalam implementasinya, Renstra Disparmudora mengedepankan prinsip-prinsip pelaksanaan yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan menjamin penggunaan sumber daya secara optimal. Selain itu, seluruh tahapan pelaksanaan harus transparan dan akuntabel, sehingga dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip partisipatif dan kolaboratif juga menjadi dasar, di mana libatkan masyarakat, komunitas, dan dunia usaha menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan. Prinsip keberlanjutan dan inklusivitas dijaga agar seluruh kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat program secara adil dan berkelanjutan.

Renstra ini mengamanatkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar semua pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Secara internal, kolaborasi antar bidang di lingkungan Disparmudora harus dilakukan secara konsisten untuk menciptakan integrasi program yang saling menguatkan. Koordinasi lintas perangkat daerah, seperti dengan Bappenda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD lainnya, juga diperlukan guna menyinergikan kegiatan yang mendukung sasaran bersama. Selain itu, kemitraan dengan organisasi pemuda, pelaku usaha pariwisata, KONI, serta masyarakat umum sangat penting dalam memperkuat dukungan dan memperluas jangkauan manfaat dari program Disparmudora.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Renstra, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang kuat, konsisten, dan terukur. Evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama dilakukan secara berkala melalui laporan kinerja seperti LAKIP, SAKIP, dan evaluasi internal.

Hasil monitoring digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan kebijakan dan strategi ke depan. Apabila terjadi perubahan kondisi strategis, seperti bencana, krisis ekonomi, atau perubahan regulasi nasional, maka Renstra dapat disesuaikan agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika yang terjadi. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra tetap adaptif, terkendali, dan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dari siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam konteks Renstra Disparmudora, pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tiga urusan utama, yaitu pariwisata, kepemudaan, dan olahraga.

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, baik dari aspek realisasi anggaran, capaian output, maupun kesesuaian dengan target dan jadwal pelaksanaan. Mekanisme pengendalian ini dilaksanakan secara internal oleh masing-masing bidang di lingkungan Disparmudora, serta secara eksternal melalui koordinasi dengan Bappeda dan Inspektorat Daerah. Hasil pengendalian digunakan untuk melakukan koreksi dini apabila terjadi deviasi terhadap rencana.

Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan secara periodik, baik pada tingkat tahunan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maupun dalam jangka menengah melalui evaluasi pelaksanaan Renstra. Instrumen evaluasi kinerja seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi dasar utama penilaian kinerja.

Hasil evaluasi dijadikan bahan perbaikan perencanaan di tahun-tahun berikutnya, serta sebagai dasar penyusunan strategi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Dengan pengendalian dan evaluasi yang baik, pembangunan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga diharapkan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Malili, September 2025

Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan & Olahraga,



ANDIJABACINA AKHMAD, S.STP., M.SI
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 197707312006041019